

# STATISTIK DAERAH

KOTA JAKARTA BARAT



2025





# STATISTIK DAERAH

KOTA JAKARTA BARAT

<https://jakbarkota.bps.go.id>

2025

## **STATISTIK DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, 2025**

No. ISSN	: -
No. Publikasi	: 31740.25013
Katalog BPS	: 1101002.3174
Ukuran Buku	: 17,7 x 25 cm
Jumlah Halaman	: x + 52 halaman
Naskah	: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat
Desain Cover	: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat
Penerbit	: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat
Pencetak	: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat
Sumber Ilustrasi	: canva.com

Diperkenankan mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil dengan mencantumkan sumber dari Badan Pusat Statistik



# TIM

# PENYUSUN

<b>PENGARAH</b>	: Muhammad Noval, S.ST, ME
<b>PENANGGUNG JAWAB TEKNIS</b>	: Wanda Pribadi, S.ST
<b>PENYUNTING</b>	: Wanda Pribadi, S.ST Resiwati Fajrina Mustiqa Zain, SST., M.Stat.
<b>TATA LETAK DAN GAMBAR KULIT</b>	: Diah Asrianda P.N., S.Tr.Stat
<b>GAMBAR KULIT</b>	: Diah Asrianda P.N., S.Tr.Stat
<b>PENULIS</b>	: Najla' Salshabila, S.Tr.Stat Diah Asrianda P.N., S.Tr.Stat

<https://jakbar.kon.dps.go.id/>



# KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Daerah Kota Jakarta Barat tahun 2025 merupakan seri publikasi tahunan BPS yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat berbagai informasi/indikator terpilih terkait dalam pembangunan di berbagai sektor serta dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan serta potensi yang ada.

Publikasi ini dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan pengguna data akan kompilasi data yang terkini dengan tampilan yang segar dan singkat. Publikasi Statistik Daerah akan terus mengalami penyempurnaan baik struktur, ulasan, maupun mutunya. Untuk itu kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang.

Semoga publikasi ini diharapkan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.



Jakarta, Oktober 2025  
Kepala BPS Kota Jakarta Barat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Noval', written over a white background.

Muhammad Noval, S.ST, M.E





# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>VII</b>
<b>STATISTIK KUNCI</b>	<b>1</b>
<b>1. GEOGRAFI DAN IKLIM</b>	<b>3</b>
<b>2. PEMERINTAHAN</b>	<b>5</b>
<b>3. KEPENDUDUKAN</b>	<b>9</b>
<b>4. KETENAGAKERJAAN</b>	<b>13</b>
<b>5. PENDIDIKAN</b>	<b>17</b>
<b>6. KESEHATAN</b>	<b>21</b>
<b>7. PERUMAHAN</b>	<b>25</b>
<b>8. KEMISKINAN</b>	<b>27</b>
<b>9. PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	<b>31</b>
<b>10. PERTANIAN</b>	<b>33</b>
<b>11. KEUANGAN DAN KOPERASI</b>	<b>35</b>
<b>12. ENERGI DAN AIR BERSIH</b>	<b>37</b>
<b>13. PERDAGANGAN</b>	<b>39</b>
<b>14. HOTEL DAN PARIWISATA</b>	<b>41</b>
<b>15. TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI</b>	<b>43</b>
<b>16. HARGA</b>	<b>45</b>
<b>17. PENGELUARAN PENDUDUK</b>	<b>47</b>
<b>18. PENDAPATAN REGIONAL</b>	<b>49</b>
<b>19. PERBANDINGAN REGIONAL</b>	<b>51</b>





# STATISTIK KUNCI

Indikator Kependudukan		2023	2024	2025
Jumlah Penduduk	ribu jiwa	2.470,05	2.479,57	2.487,2
Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	19.068	19.141	19.200
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	persen	101,34	101,10	100,85

Sumber: Badan Pusat Statistik - Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi DKI Jakarta 2020-2035, Hasil SP2020

Indikator Sosial		2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	63,97	64,80	64,12
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	7,10	7,57	6,18
Jumlah Penduduk Miskin	ribu jiwa	112,18	109,49	106,48
Angka Kemiskinan	persen	4,22	4,09	3,94
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	persen	83,43	83,85	84,40

Sumber: Badan Pusat Statistik - SAKERNAS, 2024; Infografis IPM DKI Jakarta, 2024

Indikator Ekonomi		2022	2023	2024
PDRB Harga Berlaku	triliun Rp	540,75	585,46*	627,87**
PDRB Harga Konstan 2010	triliun Rp	345,62	363,93*	383,11**
Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,50	5,30*	5,27**
Inflasi	persen	4,21	2,28	1,48

Sumber: Badan Pusat Statistik - PDRB Kota Jakarta Barat, 2024; BRS Inflasi DKI Jakarta

\*\* : angka sangat sementara

\* : angka sementara



# Geografi & Iklim

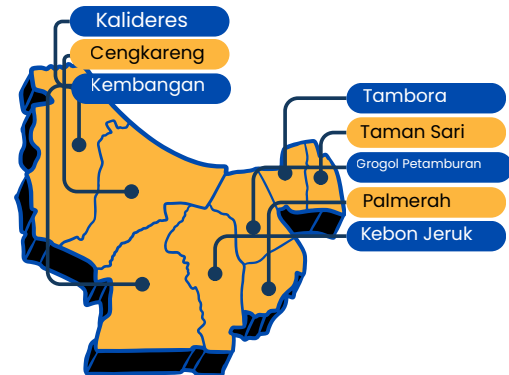
# 1

Kota Administrasi Jakarta Barat terletak antara 5°19'12"-6°23'54" Lintang Selatan dan 106°22'42"- 106°58'18" Bujur Timur. Jakarta Barat merupakan dataran rendah yang terletak sekitar 7 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, luas wilayahnya 129,54 km<sup>2</sup> dan terdapat 23 sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air, perikanan, dan bisnis perkotaan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Jakarta Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut; di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Adm. Jakarta Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Adm. Jakarta Pusat, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Provinsi Banten Kota Adm. Jakarta Selatan.

Kota Jakarta Barat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dengan urutan wilayah kecamatan berdasarkan luasnya, yaitu: Kecamatan Kalideres sebesar 39,23 km<sup>2</sup>; Kecamatan Cengkareng sebesar 26,54 km<sup>2</sup>; Kecamatan Kembangan sebesar 24,16 km<sup>2</sup>; Kecamatan Kebon Jeruk sebesar 17,98 km<sup>2</sup>; Kecamatan Grogol Petamburan sebesar 9,99 km<sup>2</sup>; Kecamatan Taman Sari sebesar 7,73 km<sup>2</sup>; Kecamatan Palmerah sebesar 7,51 km<sup>2</sup>; dan Kecamatan Tambora sebesar 5,4 km<sup>2</sup>.

Peta Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat, 2024



Setiap kecamatan di Kota Jakarta Barat memiliki karakteristik dan keunggulan yang beragam. Bagian barat seperti Kalideres dan Cengkareng cenderung didominasi kawasan permukiman dan industri, sementara bagian timur seperti Taman Sari dan Tambora memiliki area padat penduduk dengan aktivitas ekonomi rumah tangga yang tinggi. Kecamatan Kebon Jeruk, Palmerah, dan Grogol Petamburan cukup unggul dalam sektor bisnis dengan fasilitas umum penting lainnya yang menjadi destinasi favorit di DKI Jakarta.

## Geografi dan Iklim Kota Adm. Jakarta Barat, 2024



Uraian		2024
Luas Wilayah	km <sup>2</sup>	129,54
Suhu Udara	°C	28,97
Kecepatan Angin	knot	1,21
Kelembapan Udara	persen	76,19
Curah Hujan	mm <sup>2</sup>	2.259,20
Tekanan Udara	milibar	1.009,9
Hari Hujan	hari	262
Penyinaran Matahari	jam	50,10

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Secara rata-rata, suhu udara di Jakarta Barat pada tahun 2024 adalah 28,97°C dengan suhu udara terendah yaitu 23,60°C terjadi pada bulan Juli dan September, sedangkan suhu tertinggi yaitu 36,60°C terjadi pada bulan Mei. Adapun rata-rata kecepatan angin pada tahun 2024 adalah 1,21 knot dimana terjadi penurunan di pertengahan tahun hingga 0,98 knot, dan kembali mengalami peningkatan di akhir tahun. Rata-rata kelembapan udara di Jakarta Barat tahun 2024 sebesar 76,19 persen dengan tingkat kelembapan udara terendah terjadi pada Agustus dan tertinggi terjadi pada Januari. Jumlah curah hujan yang terjadi di Kota Jakarta Barat pada tahun 2024 adalah 2.259,2 mm<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah hari hujan sejumlah 262 hari selama 2024. Rata-rata tekanan udara pada tahun 2024 sebesar 1.009,9 mb dengan rata-rata tekanan udara terendah pada bulan April sebesar 1.008,27 mb dan rata-rata tertinggi pada bulan Februari 1.010,85 mb. Selain itu, penyinaran matahari memiliki durasi 50,10 jam pada 2024.

## SDGs Goal: Climate Action and Synergies

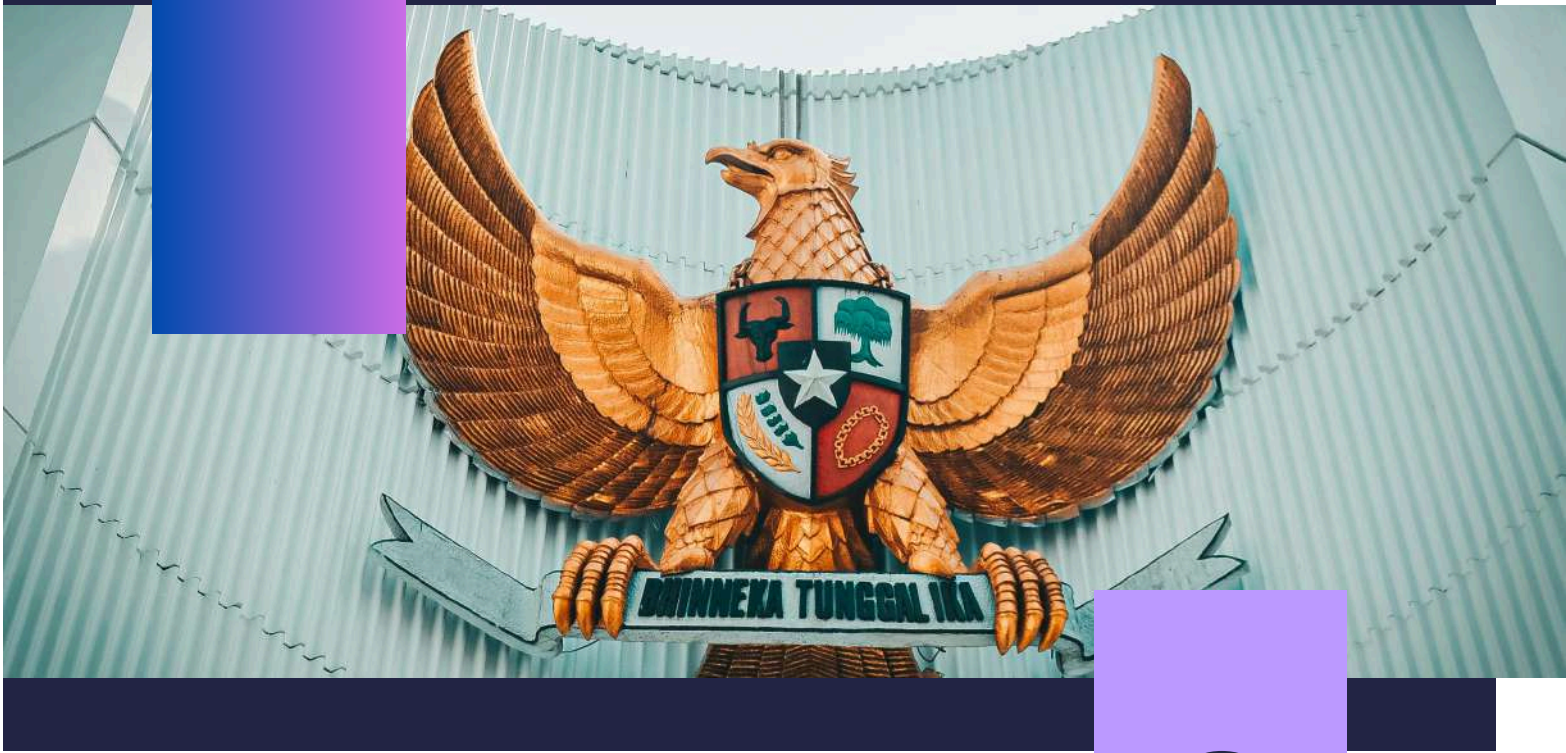
Goals

# 13

## Take urgent action to combat climate change and its impacts

← Previous    Next →

Sumber: [sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)



# Pemerintahan

# 2

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 19, Jakarta Barat merupakan Kota Administrasi yang dipimpin oleh seorang walikota dibantu wakil walikota yang diangkat oleh gubernur dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah kecamatan yang ada di Kota Jakarta Barat sebanyak 8 kecamatan, 56 kelurahan. Adapun jumlah Rukun Warga (RW) pada tahun 2024 sebanyak 587 RW dan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 6.529 RT. Jumlah RT pada tahun 2024 meningkat sebanyak 8 RT dibanding tahun 2023 karena terjadi pemekaran SLS di berbagai kecamatan.

PNS di Kota Jakarta Barat pada tahun 2024 berjumlah 6.875 dengan rincian 3.174 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 3.701 pegawai berjenis kelamin perempuan. Jumlah PNS tersebut konsisten mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir. Dibandingkan tahun 2023, jumlah PNS di Pemerintahan Kota Jakarta Barat turun 7,4 persen. Pertumbuhan negatif jumlah PNS tersebut terjadi baik pada PNS laki-laki maupun perempuan. Penurunan terbanyak terjadi pada PNS laki-laki sebesar 7,03 persen (240 pegawai), sementara jumlah PNS perempuan turun 23,45 persen (941 pegawai). Penurunan jumlah PNS ini dapat disebabkan karena banyak pegawai sudah mulai memasuki masa pensiun.

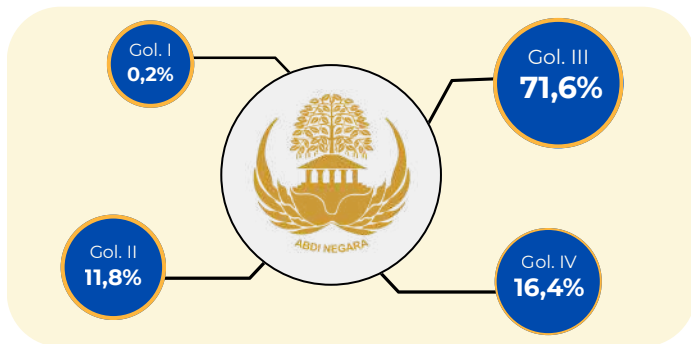
Jika ditinjau menurut golongan kepang-katan, PNS Kota Jakarta Barat tahun 2024 didominasi oleh golongan III dengan 71,6 persen dari total PNS di Pemerintah Kota Jakarta Barat atau sebanyak 4.920 pegawai. Kemudian diikuti oleh PNS dengan golongan IV dengan persen-tase 16,4 persen atau sebanyak 1.129 pegawai. Sementara PNS golongan II persentasenya 11,8 persen atau sebanyak 811 pegawai.

**Jumlah PNS Pemerintah Kota Jakarta Barat menurut Jenis Kelamin, 2023- 2024**

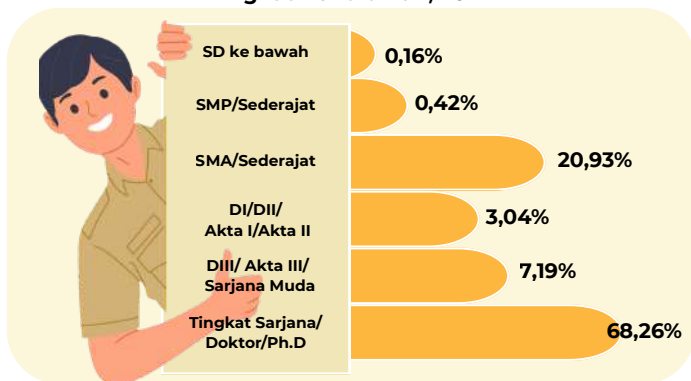
Jenis Kelamin	2023	2024
Laki-laki	3.414	3.174
Perempuan	4.012	3.701
<b>Total</b>	<b>7.426</b>	<b>6.875</b>

Sumber: Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Barat

### Proporsi PNS Pemerintah Kota Jakarta Barat menurut Golongan, 2024



### Persentase PNS Kota Jakarta Barat menurut Tingkat Pendidikan, 2024



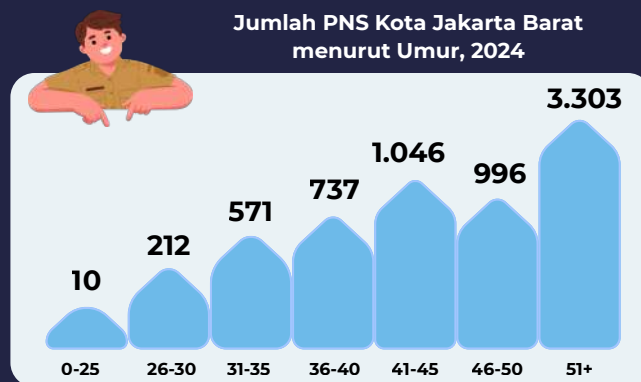
Sumber: Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Barat

Menurut jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan, PNS dengan pendidikan DIV/S1/S2/S3 pada tahun 2024 mencapai 68,26 persen atau sebanyak 4.693 pegawai. Jumlah PNS di Kota Jakarta Barat, baik pada kelompok laki-laki maupun perempuan, sudah didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, terutama pada tingkat sarjana/doktor. Dengan tingkat pendidikan yang sebagian besar telah mencapai tingkat perguruan tinggi ini, PNS Kota Jakarta Barat diharapkan mampu menjadi pelayan publik yang profesional dan berintegritas.

Jika dilihat berdasarkan usia, PNS Jakarta Barat yang berusia kurang dari 50 tahun berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan usia 50, yaitu 3.572 PNS. Namun, perbedaan ini tidak terlalu signifikan karena mengingat usia 50 tahun adalah usia yang akan memasuki masa non produktif. Dalam lima hingga delapan tahun ke depan, terdapat 3.303 PNS yang akan memasuki masa purnabakti.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157, salah satu sumber Penda-patan Asal Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak resto-

### Jumlah PNS Kota Jakarta Barat menurut Umur, 2024



Sumber: Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Barat

ran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Pada tahun 2024, pemasukan pajak pada tabel di atas (Pajak Daerah: selain Pajak Kendaraan Bermotor) melebihi target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 109,38 persen. Realisasi ini mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2023 yang mencapai 106,81 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis Pajak Daerah tersebut, pemasukan terbesar merupakan pajak restoran sebesar 656,08 milyar rupiah. Di samping pajak daerah, pajak dengan pemasukan terbesar adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang bernilai lebih dari 2 triliun rupiah di tahun 2024.

### Target dan Realisasi Pajak Kota Jakarta Barat, 2024 (milyar Rp)



Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

Sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan negara, membayar pajak menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia melakukan pembangunan di semua sektor dengan penerimaan pajak tersebut, tentunya seperti pembangunan infra-struktur baru atau peremajaan untuk peningkatan kualitas rumah sakit, sekolah, taman kota, hingga jembatan penye-brangan yang menunjang seluruh aktifitas masyarakat.



**Target dan Realisasi Pajak menurut Jenis Pajak Kota Adm. Jakarta Barat, 2024 (milyar Rp)**

Jenis Pajak	Target	Realisasi
Pajak Hotel	179,98	200,16
Pajak Restoran	645,46	656,08
Pajak Hiburan	98,43	104,68
Pajak Reklame	96,08	159,44
Pajak Parkir	47,82	47,57
Pajak Kendaraan Bermotor	2.031,35	2.102,65
Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.325,40	1.351,98
<b>Total</b>	<b>4.424,51</b>	<b>4.622,58</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta



<https://jakbarkota.bps.go.id>

## SDGs Goal: Institutional frameworks

Goals

16

**Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels**

Sumber: [sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)



# Kependudukan

# 3

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk Kota Jakarta Barat meningkat setiap tahunnya, baik dikarenakan faktor pertumbuhan alami (fertilitas) maupun faktor migrasi.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebanyak 2.556.752 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah dengan populasi padat di DKI Jakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 19.737,16 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan yang tinggi ini menggambarkan besarnya tekanan terhadap kebutuhan ruang, perumahan, serta fasilitas umum seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan penduduknya justru menunjukkan angka -0,021%, menandakan adanya sedikit penurunan jumlah penduduk atau perlambatan pertumbuhan yang bisa disebabkan oleh migrasi keluar wilayah atau perubahan pola demografi.

Selain itu, sex ratio sebesar 101,1% di tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan, terdapat sebanyak 101 hingga 102 penduduk laki-laki di Kota Jakarta Barat. Secara keseluruhan, kondisi demografi Jakarta Barat pada tahun 2024 mencerminkan populasi yang padat namun relatif stabil, dengan tantangan utama pada pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah kepadatan yang tinggi.

## Statistika Kependudukan Kota Jakarta Barat, 2024

Jumlah Penduduk

**2.556.752 jiwa**

Kepadatan Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)

**19.737,16**

**-0,021%**

Laju Pertumbuhan Penduduk

Dependency Ratio

**40,19%**

**101,1%**

Sex Ratio

Sumber: Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



### Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Jakarta Barat, 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
Kembangan	311.262	12.883,36
Kebon Jeruk	362.641	20.169,13
Palmerah	225.842	30.072,17
Grogol Petamburan	230.173	23.040,34
Tambora	258.061	47.789,07
Taman Sari	122.909	15.900,26
Cengkareng	581.788	21.921,18
Kalideres	464.076	15.351,51
<b>Total</b>	<b>2.556.752</b>	<b>19.737,16</b>

Sumber: Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kecamatan Cengkareng menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi yakni 581.788 jiwa, disusul oleh Kalideres dengan 464.076 jiwa. Kedua wilayah ini dikenal sebagai kawasan permukiman padat yang berkembang pesat akibat tingginya arus urbanisasi dan ketersediaan hunian terjangkau. Fenomena ini menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk bermukim di wilayah yang memiliki akses transportasi yang baik, dekat dengan kawasan industri, serta fasilitas publik yang memadai.

Di sisi lain, Palmerah mencatat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 30.072 jiwa per km<sup>2</sup>, menandakan tekanan ruang yang tinggi di kawasan tersebut karena banyaknya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan perdagangan. Sebaliknya, Kembangan memiliki kepadatan terendah yaitu 12.883 jiwa per km<sup>2</sup>, menunjukkan masih tersedianya ruang terbuka dan area permukiman yang lebih longgar. Perbedaan kepadatan ini mencerminkan ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah di Jakarta Barat, yang dapat berdampak pada ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.



**Dependency Ratio Jakarta Barat masih mencapai dari 40 persen.**

*Dependency ratio* merupakan salah satu indikator penting dalam analisis kependudukan karena menggambarkan beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar pula beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif untuk menopang kebutuhan anak-anak dan lansia. Berdasarkan data tahun 2024, setiap 100 penduduk usia produktif di Kota Jakarta Barat menanggung sekitar 40 penduduk usia nonproduktif. Dengan kata lain, setiap 5 penduduk produktif menanggung kurang lebih 2 penduduk yang belum atau tidak lagi bekerja. Angka ini menunjukkan bahwa beban tanggungan di Jakarta Barat masih relatif moderat, yang berarti wilayah ini masih memiliki potensi ekonomi yang baik selama kelompok usia produktif dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja.

Piramida penduduk Kota Jakarta Barat seperti gambar di bawah, masih menunjukkan bentuk Piramida Ekspansif (piramida muda). Piramida ini bercirikan penduduk yang sebagian besar berusia muda. Secara komposisi, penduduk lansia sangat berjumlah sedikit sehingga membentuk segitiga ke bawah. Piramida penduduk menunjukkan usia 35-39 tahun masih mendominasi komposisi penduduk Kota Jakarta Barat pada tahun 2025. Komposisi terbesar kedua adalah penduduk dengan usia 40 - 44 tahun.

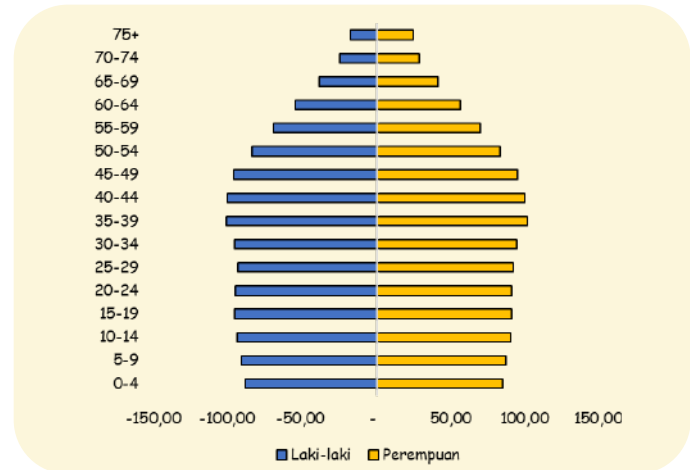
Dominasi usia produktif ini sebagian besar terdiri atas generasi milenial dan generasi Z, dua kelompok yang dikenal adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Kecenderungan ini sejalan dengan karakteristik wilayah Jakarta Barat sebagai kawasan perkotaan dengan tingkat akses internet dan penggunaan gawai yang tinggi. Kehadiran generasi digital ini menjadi modal penting dalam mendukung trans-

formasi menuju ekonomi kreatif dan digital, terutama di sektor perdagangan daring, jasa, serta teknologi informasi. Namun, peluang ini juga disertai tantangan seperti keterbatasan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi generasi muda serta ketatnya persaingan di tengah arus urbanisasi.

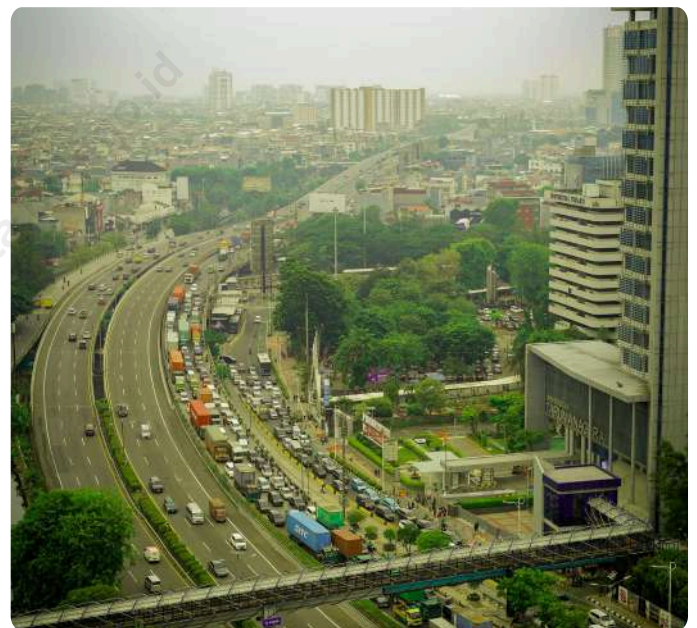
Secara keseluruhan, piramida penduduk tahun 2025 menggambarkan bahwa Jakarta Barat berada pada masa transisi demografis yang penting dengan peluang besar dari bonus demografi, namun juga tantangan nyata dari urbanisasi, ketimpangan akses pekerjaan, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Optimalisasi potensi usia produktif melalui inovasi, pelatihan kerja, dan perluasan lapangan kerja yang berbasis digital akan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah ini.

Sementara itu, bagian atas piramida menunjukkan bahwa proporsi penduduk lanjut usia (lansia) mulai mengalami peningkatan walaupun belum terlalu signifikan. Fenomena ini menandakan pergeseran struktur penduduk menuju fase *aging population* secara perlahan, yang perlu diantisipasi melalui kebijakan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi kelompok lansia. Di sisi lain, penurunan proporsi penduduk usia anak menunjukkan adanya penurunan tingkat fertilitas, yang merupakan ciri umum daerah perkotaan dengan tingkat pendidikan dan biaya hidup yang tinggi.

Piramida Penduduk Kota Jakarta Barat, 2025



Sumber: Proyeksi Penduduk 2020-2035, BPS Provinsi DKI Jakarta



Sumber: canva.com



# Job Opportunity

## EMPLOYMENT

# Ketenagakerjaan

# 4

Kondisi ketenagakerjaan menjadi perhatian khusus bagi setiap negara, terutama bagaimana negara dapat memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya untuk warga negaranya sendiri. Indonesia telah menugaskan BPS untuk memfasilitasi terbentuknya indikator strategis terkait keadaan tenaga kerja melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

**Statistik Ketenagakerjaan  
Kota Jakarta Barat, 2022-2024**

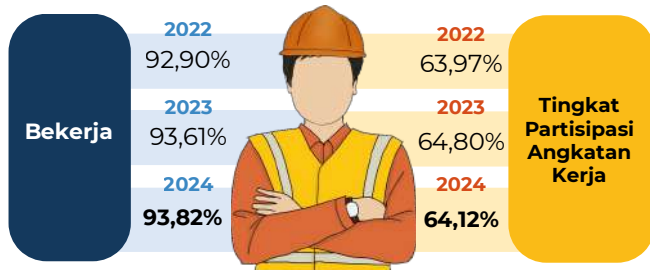
Uraian	2022	2023	2024
Penduduk Usia 15+ (000 jiwa)	2.074,60	1.921,38	1.936,25
Angkatan Kerja (000 jiwa)	1.327,17	1.244,99	1.241,43
Penduduk Bekerja (000 jiwa)	1.232,97	1.165,48	1.164,74
Pengangguran (000 jiwa)	94,21	94,21	76,69

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 2022 - 2024

SAKERNAS mengadopsi konsep dan defisini bekerja dari International Labour Organization (ILO). Menurut konsep ILO, penduduk usia kerja adalah yang berusia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2024, terjadi sedikit kenaikan jumlah penduduk usia kerja, dimana 1,24 juta diantaranya merupakan angkatan kerja. Angkatan kerja merujuk pada penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran (selain penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga, bersekolah, atau berkegiatan lain). Di antara angkatan kerja tersebut, terdapat sekitar 1,16 juta penduduk yang bekerja dan 77 ribu penduduk yang tidak bekerja.



**Persentase TPAK dan Penduduk Bekerja di Kota Jakarta Barat, 2022-2024**

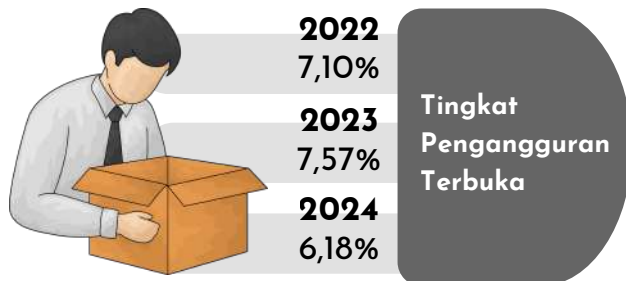


Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 2022 - 2024

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Jakarta Barat menunjukkan tren positif. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) cenderung stabil, yakni sebesar 63,97 persen pada tahun 2022, sedikit meningkat menjadi 64,80 persen pada 2023, dan berada di angka 64,12 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja tetap aktif dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Sementara itu, persentase penduduk yang bekerja terus mengalami peningkatan dari 92,90 persen pada 2022 menjadi 93,82 persen pada 2024.

Peningkatan ini mencerminkan kondisi ekonomi Jakarta Barat yang semakin pulih pasca pandemi, dengan semakin banyaknya sektor usaha dan lapangan kerja yang terbuka, terutama di bidang perdagangan, jasa, dan industri kreatif. Namun demikian, meskipun tingkat partisipasi kerja cukup tinggi, tantangan tetap ada dalam memastikan kualitas pekerjaan yang layak dan produktif bagi seluruh angkatan kerja. Ke depan, peningkatan keterampilan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja formal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah ini.

**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jakarta Barat, 2022-2024**

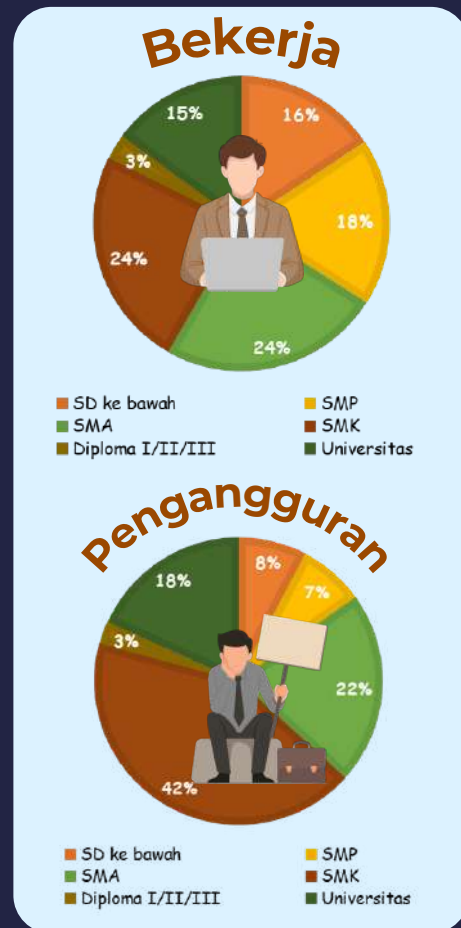


Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 2022 - 2024

Angka yang semakin membaik ini tidak hanya terlihat dari indikator TPAK, namun juga dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Jika dilihat trennya dalam tiga tahun terakhir, TPT Jakarta Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2022 dimana TPT menurun hampir 2 persen. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan meningkatnya peluang kerja, terutama di sektor jasa dan informal.

Walaupun begitu, roda perekonomian Indonesia memang masih membutuhkan banyak waktu untuk pulih dari keterpurukan sehingga para pencari kerja dapat memasuki pasar tenaga kerja kembali, salah satunya adalah dengan mengamati kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan

**Kedaaan Angkatan Kerja Kota Jakarta Barat menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, 2024**



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 2024

Gambar di samping menggambarkan perbandingan tingkat pendidikan antara penduduk yang bekerja dan yang menganggur di Kota Jakarta Barat tahun 2024. Lulusan SMK menempati proporsi terbesar pada kedua kategori, yaitu 24 persen dari penduduk bekerja dan 42 persen dari penduduk menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan menengah kejuruan bertujuan menyiapkan tenaga kerja siap pakai, namun masih banyak lulusan SMK yang belum terserap di pasar kerja. Sementara itu, lulusan universitas dan diploma memiliki proporsi lebih kecil dalam kategori pengangguran, menandakan peluang kerja yang relatif lebih baik bagi mereka. Fenomena ini menegaskan pentingnya penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri agar lulusan SMK lebih kompetitif dan sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

**UMR Kota Jakarta Barat tahun 2024 sebesar Rp5.067.381**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 818 Tahun 2024, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp5.067.381,00 atau naik 3,38 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4.901.798,00. Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja di tengah meningkatnya biaya hidup di ibu kota. Dengan adanya penyesuaian UMP ini, diharapkan pekerja dapat memperoleh penghasilan yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup dan produktivitas tenaga kerja di Jakarta.

## SDGs Goal: Employment, decent work for all and social protection

Goals

8

**Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all**

Sumber: [sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)



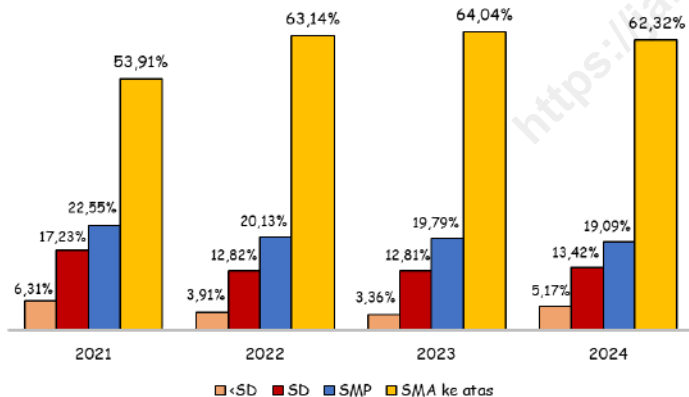


# Pendidikan

5



**Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi, 2021-2024**



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2021-2024

Pendidikan di Kota Jakarta Barat terus menunjukkan perbaikan meskipun masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMA ke atas mencapai 47,68%, meskipun menurun dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 64,04%. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penyesuaian data yang lebih rinci termasuk

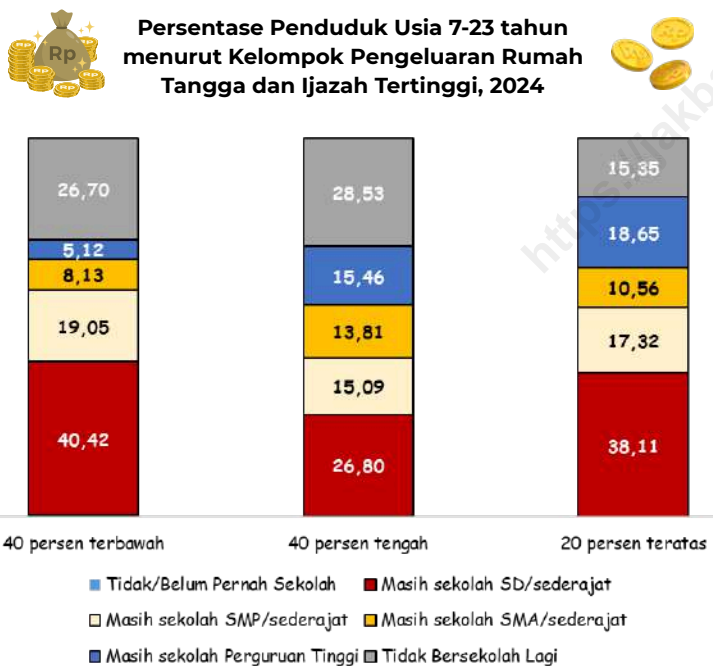
pencatatan pendidikan tinggi yang baru dipisahkan secara terpisah. Meskipun demikian, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Jakarta Barat sudah menyelesaikan pendidikan SMA atau setara, yang menunjukkan kemajuan dalam akses pendidikan.

Namun, masih ada tantangan dalam mengurangi persentase penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar. 5,17% dari penduduk usia 15 tahun ke atas masih belum menyelesaikan pendidikan dasar atau bahkan tidak bersekolah, meskipun ini menurun dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat 6,31%. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan, tetapi tetap menunjukkan ketimpangan yang perlu diatasi agar tidak ada yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan dasar.



Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia sedang bersiap memasuki era baru yang dikenal dengan *Era Society 5.0*, yang menekankan pada sinergi antara teknologi dan kebutuhan manusia. Untuk mempersiapkan generasi muda agar dapat bersaing di dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi, pendidikan perlu berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21, termasuk 4C (*Creativity, Critical Thinking, Communication, Collaboration*).

Pemerintah Indonesia, dalam upayanya untuk mendukung kesiapan masyarakat memasuki era ini, telah memperkenalkan kebijakan yang mendukung pendidikan berbasis teknologi dan pengembangan keterampilan yang relevan. Salah satunya adalah program Merdeka Belajar, yang memungkinkan sekolah untuk lebih fleksibel dalam menyusun kurikulum, serta memperkenalkan pendidikan berbasis proyek dan pengembangan keterampilan digital. Penguatan infrastruktur digital di sekolah-sekolah juga menjadi bagian penting dari upaya mempersiapkan siswa untuk tantangan global.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2024

**“Apakah tingginya penghasilan orang tua menentukan tingkat pendidikan anaknya?”**

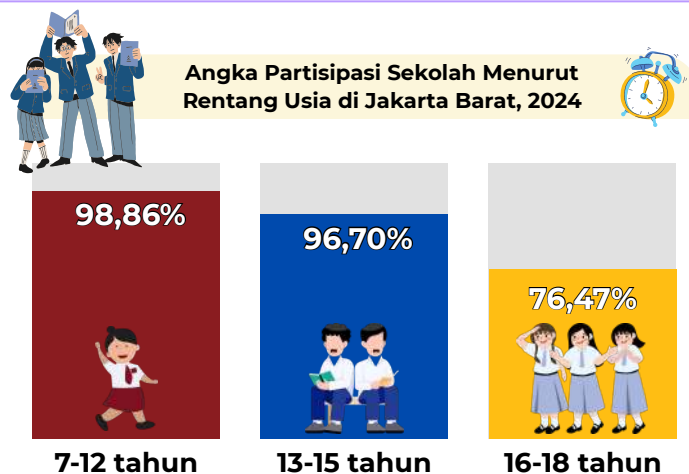
Kesiapan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah urban seperti Jakarta Barat, semakin dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah masih memiliki tantangan besar dalam menjangkau pendidikan yang lebih tinggi. Sebanyak 26,70% dari kelompok ini sudah tidak bersekolah lagi, dan hanya 5,12% yang berhasil menembus jenjang pendidikan tinggi. Sebaliknya, pada kelompok 20 persen teratas, proporsi anak usia 7–23 tahun yang menempuh perguruan tinggi mencapai 18,65%, sementara yang sudah tidak bersekolah lagi hanya 15,35%.

Fakta ini mempertegas bahwa kemampuan ekonomi keluarga sangat memengaruhi kelanjutan pendidikan anak-anak. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah lebih rentan berhenti sekolah lebih awal, baik karena tuntutan ekonomi maupun keterbatasan akses. Padahal secara ideal, setiap anak usia sekolah seharusnya dapat menyelesaikan pendidikan setidaknya sampai tingkat menengah atas. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial dan program afirmatif bagi keluarga tidak mampu.

Banyak jurnal yang meneliti hubungan linear antara penghasilan orang tua dengan tingkat pendidikan anak. Secara tidak langsung, data BPS turut pula menunjukkan rumah tangga kelompok pengeluaran 20 persen teratas, berada pada komposisi yang lebih baik dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 7–12 tahun telah mencapai 98,86%, menandakan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Indonesia telah mengakses pendidikan. Capaian ini menunjukkan efektivitas program wajib belajar 12 tahun, serta dukungan pemerintah melalui bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan BOS. Meskipun begitu, penurunan mulai terlihat pada kelompok usia 13–15 tahun yang mencatat APS sebesar 96,7%, yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil anak mulai terlepas dari pendidikan saat memasuki jenjang SMP.

Penurunan paling signifikan terjadi pada kelompok usia 16–18 tahun, di mana APS turun menjadi 76,47%. Ini berarti hampir satu dari empat remaja di usia sekolah menengah atas tidak lagi bersekolah. Penyebab utamanya antara lain adalah kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses ke sekolah lanjutan, serta rendahnya minat karena kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan keterampilan kerja. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya lebih lanjut seperti perluasan akses ke pendidikan vokasi, penguatan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu, serta inovasi pembelajaran yang lebih menarik dan kontekstual agar siswa tetap termotivasi melanjutkan sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2024

Terlebih lagi di era digital ini, pendidikan memiliki peran yang sangat penting sebagai kunci dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman yang berkembang sangat pesat. Di tengah arus informasi yang melimpah, pendidikan membantu masyarakat memiliki literasi digital agar mampu memilah informasi yang benar, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi secara bijak. Dunia kerja pun kini menuntut keterampilan baru seperti kemampuan beradaptasi, berpikir kreatif, dan menguasai teknologi digital. Melalui pendidikan, generasi muda dapat mempersiapkan diri menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

## SDGs Goal: Education

Goals

4

**Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all**

Sumber: [sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)

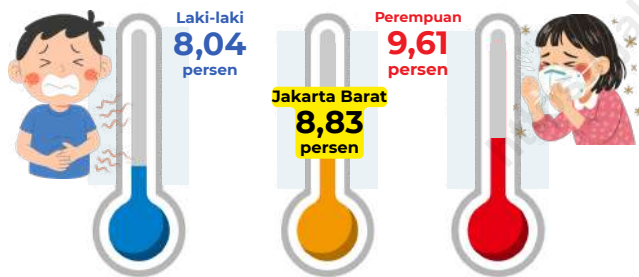




# 6

# Kesehatan

**Angka Kesakitan Penduduk Jakarta Barat Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran, 2024**



Kelompok Pengeluaran	Angka Kesakitan (%)
40 persen terbawah	8,84
40 persen tengah	9,98
20 persen teratas	6,51

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2024

Data angka kesakitan memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Angka kesakitan juga menjadi indikator efektivitas berbagai intervensi kesehatan, misalnya program imunisasi atau pemberantasan penyakit menular. Daerah dengan angka

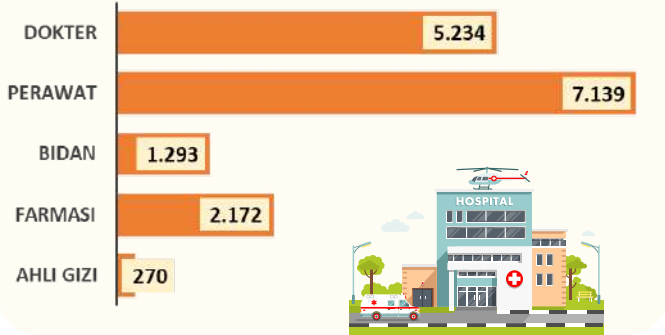
kesakitan tinggi membutuhkan perhatian khusus dalam hal penyediaan tenaga medis, fasilitas, serta anggaran kesehatan.

Berdasarkan data SUSENAS yang dilakukan BPS pada tahun 2024, angka kesakitan Jakarta Barat secara keseluruhan adalah 8,83 persen. Dengan kata lain, angka ini menunjukkan bahwa di antara 100 orang, terdapat 8 hingga 9 orang yang pernah menderita sakit. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka kesakitan perempuan yang mencapai 9,61 persen, tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki sebesar 8,04 persen. Perbedaan ini dapat mencerminkan beberapa faktor, seperti beban ganda perempuan dalam pekerjaan rumah tangga dan aktivitas ekonomi, serta perbedaan perilaku dalam menjaga kesehatan atau mengakses layanan medis.





### Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Jakarta Barat tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kesakitan dan kesejahteraan masyarakat dalam hal kesehatan, tenaga ahli dalam bidang kesehatan terus digencarkan dan tersebar di seluruh kota Jakarta Barat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, jumlah tenaga kesehatan di Kota Jakarta Barat didominasi oleh perawat sebanyak 7.139 orang, diikuti oleh dokter sebanyak 5.234 orang. Sementara itu, tenaga farmasi berjumlah 2.172 orang, bidan 1.293 orang, dan ahli gizi merupakan yang paling sedikit dengan hanya 270 orang.

Kondisi ini menggambarkan bahwa tenaga medis di Jakarta Barat masih didominasi oleh profesi yang berperan langsung dalam pelayanan kuratif, seperti dokter dan perawat. Jumlah tenaga ahli gizi yang masih rendah menunjukkan perlunya peningkatan perhatian terhadap aspek gizi dan pencegahan penyakit. Dengan penguatan tenaga di bidang promotif dan preventif, diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Jakarta Barat dapat meningkat secara lebih seimbang dan berkelanjutan.

### Persentase Perempuan 15-49 Tahun Menurut Karakteristik dan Berat Badan Bayi Ketika Dilahirkan, 2024

Kelompok Pengeluaran	< 2.5 kg	2.5+ kg	Tidak Tahu/Tidak Ditimbang
40% terbawah	3,61	92,67	3,72
40% tengah	18,25	71,27	10,48
20% teratas	0,00	100,00	0,00
<b>Jakarta Barat</b>	<b>8,66</b>	<b>85,48</b>	<b>5,86</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2024

Indikator kesehatan juga dapat ditinjau dari kondisi bayi-bayi yang baru lahir. SUSENAS mencatat bahwa sebagian besar perempuan usia 15–49 tahun di Jakarta Barat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 2,5 kilogram. Hal ini menunjukkan kondisi kelahiran yang umumnya sehat. Namun, masih terdapat 8,66 persen bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2,5 kilogram, yang berpotensi mengalami masalah kesehatan yang menjadi topik utama, yaitu isu *stunting*.

Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, persentase bayi dengan berat lahir rendah cenderung lebih tinggi pada pen-duduk 40 persen menengah (mencapai 18,25) dibandingkan 40 persen terbawah maupun 20 persen teratas. Fenomena cukup banyak-nya proporsi ibu yang melahirkan bayi lahir hidup di bawah berat ideal pada kelompok menengah ini perlu dikaji lebih dalam, karena dapat berkaitan pada berbagai faktor. Secara keseluruhan, hal ini mengindikasikan bahwa faktor sosial ekonomi masih berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi, termasuk dalam hal gizi dan akses terhadap pelayanan kesehatan selama kehamilan.



Sumber: canva.com



Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat imunisasi balita di Indonesia telah mencapai angka yang cukup baik. Sebagian besar jenis imunisasi dasar berhasil menjangkau lebih dari 90 persen anak usia 0–59 bulan. Imunisasi BCG, Polio, DPT, dan Hepatitis B tercatat memiliki cakupan yang tinggi, masing-masing di atas 94 persen. Namun, imunisasi campak/morbili masih tertinggal dengan capaian 80,58 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meski kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi sudah meningkat, masih ada tantangan dalam memperluas cakupan untuk penyakit tertentu yang memerlukan perhatian lebih.

Jika ditinjau dari aspek kesejahteraan, terlihat bahwa tingkat ekonomi keluarga turut memengaruhi akses terhadap imunisasi. Gambar di atas menunjukkan akses imunisasi kelompok masyarakat dengan pendapatan tertinggi telah mencapai 100 persen di hampir semua jenis imunisasi. Walaupun belum seluruhnya, imunisasi campak/morbili pada penduduk kelompok pengeluaran 20 persen teratas jauh lebih tinggi di atas rata-rata persentase keseluruhan Kota Jakarta Barat (95,33 persen).

### Persentase Penduduk Umur 0-59 bulan (balita) yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Menurut Karakteristik, 2024

		Jenis Imunisasi	40% terbawah	40% tengah	20% teratas
HEPATITIS B	94,69%	BCG	95,71%	96,65%	100,00%
CAMPAK/MORBILI	80,58%	DPT	94,72%	90,35%	100,00%
POLIO	95,81%	Polio	95,78%	93,81%	100,00%
DPT	94,14%	Campak/Morbili	77,54%	79,05%	95,33%
BCG	96,62%	Hepatitis B	96,27%	89,10%	100,00%

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2024

Sementara itu, kelompok dengan pendapatan terendah cenderung memiliki capaian yang lebih rendah di semua jenis imunisasi, terutama pada imunisasi campak/morbili yang hanya mencapai 77,54 persen. Ketimpangan ini menegaskan pentingnya upaya pemerataan layanan kesehatan dasar, seperti peningkatan edukasi, penyediaan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau, serta program imunisasi gratis yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan setiap anak Indonesia dapat terlindungi secara menyeluruh dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

## SDGs Goal: Health & Population

Goals

3

**Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages**

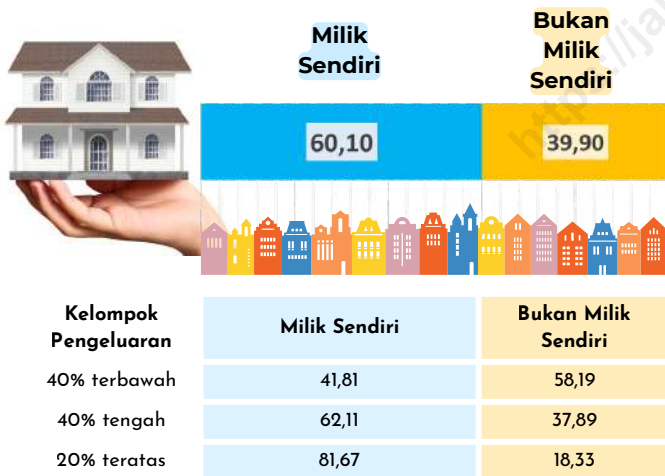
Sumber: [sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)





# Perumahan

Status Kepemilikan Rumah pada Rumah Tangga di Kota Jakarta Barat Menurut Karakteristik (persen), 2024



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2024

Meninjau status kepemilikan rumah di sebuah wilayah menjadi sangat penting karena dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kepemilikan rumah mencerminkan stabilitas ekonomi rumah tangga, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta

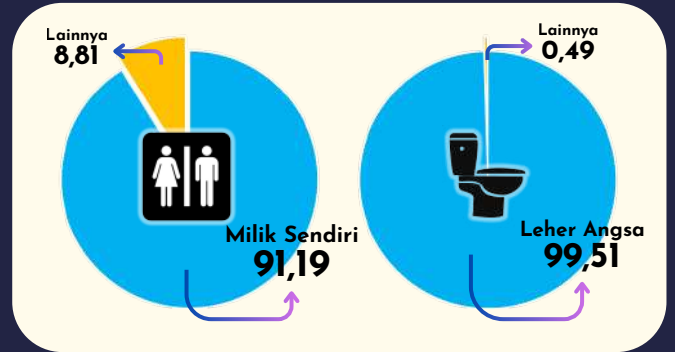
tingkat kemandirian dalam kehidupan sosial. Berdasarkan data SUSENAS 2024, sebanyak 60,10 persen rumah tangga di Kota Jakarta Barat memiliki rumah sendiri, sementara 39,90 persen lainnya menempati rumah bukan milik sendiri, seperti kontrak, sewa, atau menumpang.

Masih tingginya proporsi rumah tangga yang belum memiliki rumah, cukup men-cerminkan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan di wilayah perkotaan padat seperti Jakarta Barat. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat pola yang jelas antara tingkat kesejahteraan dan kepemilikan rumah. Rumah tangga pada kelompok 20 persen teratas memiliki tingkat kepemilikan rumah tertinggi, yaitu 81,67 persen, sedangkan pada kelompok 40 persen terbawah hanya 41,81 persen yang memiliki rumah sendiri. Sebaliknya, kelompok berpenghasilan rendah lebih banyak menempati rumah bukan milik sendiri (58,19%).

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perumahan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini dapat berupa penyediaan rumah bersubsidi, kemudahan akses pembiayaan, atau program pembangunan rumah layak huni. Tujuannya adalah untuk membantu kelompok rentan agar dapat memiliki tempat tinggal tetap, sekaligus menekan ketimpangan sosial. Dengan demikian, peningkatan akses terhadap kepemilikan rumah tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah seperti Jakarta Barat.



### Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Jenis Kloset pada Rumah Tangga di Kota Jakarta Barat (persen), 2024



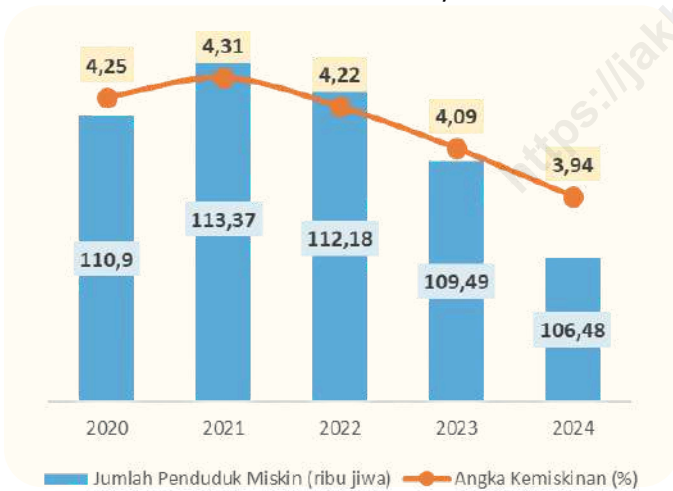
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2024

Selanjutnya fasilitas sanitasi cukup menarik untuk dibahas. Akses terhadap sanitasi yang layak, seperti kepemilikan tempat buang air besar sendiri dan penggunaan kloset yang higienis, berpengaruh langsung terhadap kualitas lingkungan dan pencegahan penyakit menular. Mayoritas rumah tangga di Kota Jakarta Barat memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri (91,19%), sementara 8,81% lainnya masih menggunakan fasilitas bersama atau milik orang lain. Selain itu, hampir seluruh rumah tangga sudah menggunakan jenis kloset leher angsa, yang menandakan tingkat sanitasi dan kesadaran kebersihan yang cukup tinggi di Kota Jakarta Barat.

# Kemiskinan

# 8

**Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Jakarta Barat, 2020-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik - SUSENAS Maret 2024

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Persentase penduduk miskin menurun dari 4,25 persen pada tahun 2020 menjadi 3,94 persen pada tahun 2024. Sejalan dengan itu,

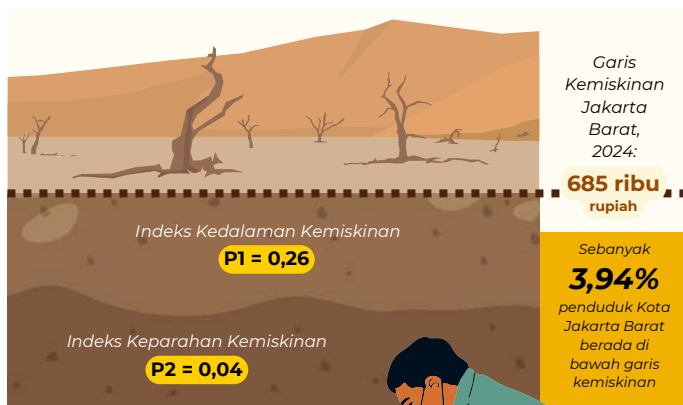
jumlah penduduk miskin juga turun dari 110,9 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 106,48 ribu jiwa pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah periode pandemi COVID-19 yang sempat meningkatkan angka kemiskinan di tahun 2021.

Perbaikan ini tidak terlepas dari pulihnya aktivitas ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, serta berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah. Namun, meskipun tren penurunan terus berlanjut, tantangan dalam mengurangi kemiskinan secara lebih merata masih perlu diperhatikan, terutama di daerah pedesaan dan kawasan timur Indonesia yang cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Upaya penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan akses terhadap lapangan kerja menjadi kunci untuk menjaga tren penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2024, garis kemiskinan di Kota Jakarta Barat tercatat sebesar Rp685 ribu per kapita per bulan. Angka ini menjadi batas yang menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau tidak. Berdasarkan hasil survei, tercatat 3,94 persen penduduk Jakarta Barat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun persentasenya tergolong kecil, data ini mengingatkan bahwa masih ada sebagian warga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari di tengah tingginya biaya hidup kota besar.

Menariknya, tingkat kemiskinan di Jakarta Barat tidak hanya rendah dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi kedalaman dan keparahannya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat 0,26, semen-tara Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) hanya 0,04. Artinya, rata-rata penduduk miskin di wilayah ini tidak jauh dari garis kemiskinan dan kesenjangan antarpenduduk miskin pun relatif kecil. Gambaran ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi perkotaan mulai membuahkan hasil. Namun, agar kemiskinan benar-benar terentaskan, dibutuhkan langkah lanjutan seperti peningkatan keterampilan kerja, pemberdayaan usaha kecil, serta pemerataan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

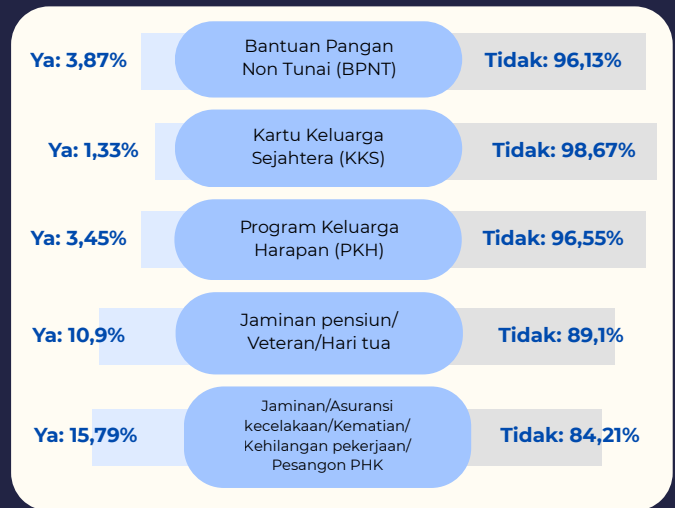
### Ilustrasi Indikator Kemiskinan tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik - SUSENAS Maret 2024



### Persentase Penduduk Jakarta Barat yang Pernah Menerima Bantuan di Tahun 2024:



Sumber: Badan Pusat Statistik - SUSENAS Maret 2024

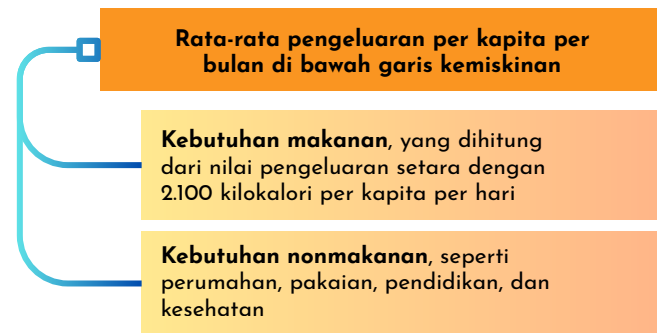
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2024, sebagian besar penduduk Indonesia belum pernah menerima berbagai jenis bantuan sosial dari pemerintah. Hal ini terlihat dari rendahnya proporsi penerima pada beberapa program utama. Hanya 3,87 persen penduduk yang pernah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 1,33 persen menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan 3,45 persen menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Angka-angka ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial dengan sasaran rumah tangga miskin masih memiliki cakupan yang terbatas dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan.

Rendahnya proporsi penerima bantuan sosial dapat disebabkan oleh mekanisme penargetan yang selektif untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan rentan. Namun, hal ini juga dapat mencerminkan tantangan dalam menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan tetapi belum terdata secara memadai dalam sistem perlindungan sosial. Penguatan basis data terpadu dan peningkatan koordinasi antar instansi menjadi penting agar penyaluran bantuan dapat lebih efektif dan inklusif.

Di sisi lain, program jaminan sosial berbasis ketenagakerjaan menunjukkan cakupan penerima yang lebih tinggi. Sebanyak 10,9 persen penduduk tercatat pernah menerima jaminan pensiun, veteran, atau hari tua, sedangkan 15,79 persen menerima jaminan/asuransi ketenagakerjaan seperti asuransi kecelakaan, kematian, atau kehilangan pekerjaan. Tingginya angka ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya pekerja formal, terhadap pentingnya perlindungan sosial jangka panjang.

Meski demikian, perbedaan cakupan antara bantuan sosial dan jaminan sosial menandakan adanya kesenjangan dalam perlindungan sosial antara kelompok formal dan informal. Pekerja informal yang jumlahnya masih dominan di Indonesia berpotensi belum terlindungi secara optimal. Oleh karena itu, perluasan akses terhadap program jaminan sosial bagi sektor informal dan penguatan sistem data kesejahteraan menjadi langkah strategis agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat perlindungan sosial secara adil dan berkelanjutan.

### Ilustrasi Indikator Kemiskinan tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik - SUSENAS



## SDGs Goal: Poverty Eradication

Goals

1

**End poverty in all its forms everywhere**

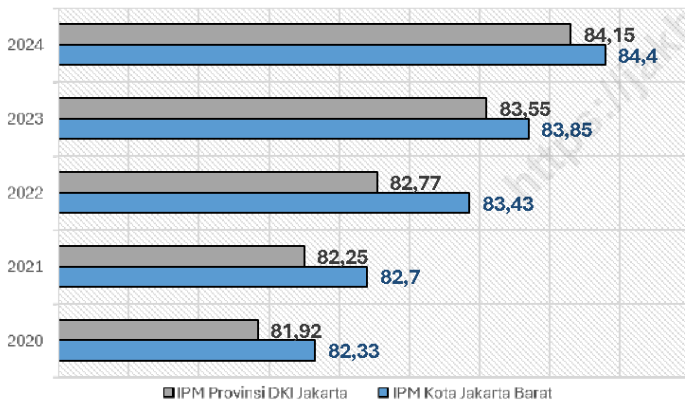
Sumber: [sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)



# Pembangunan Manusia

# 9

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2024**



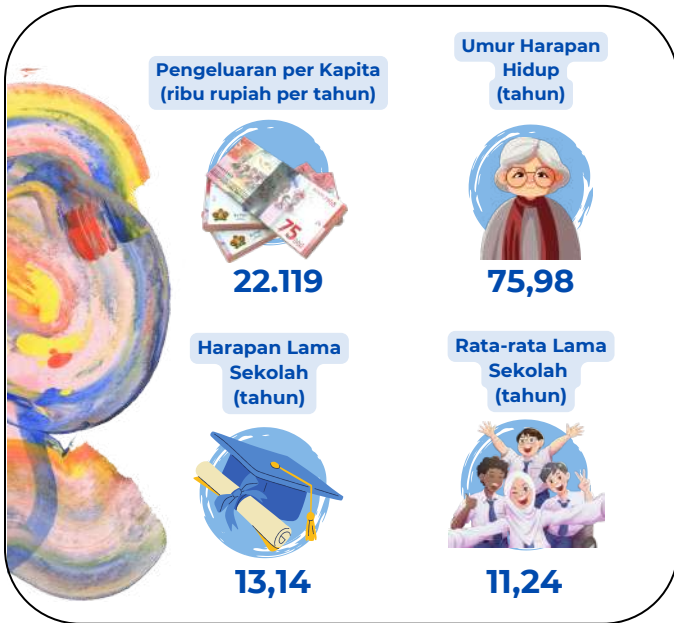
Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah. Komponen penyusun IPM dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), pengetahuan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup layak dengan indikator Pengeluaran per Kapita Penduduk yang Disesuaikan (PPP).

IPM Kota Jakarta Barat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, peningkatan IPM selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Jakarta Barat terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2024, IPM Kota Jakarta Barat tercatat mencapai 84,40, meningkat sebesar 0,55 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan IPM pada tahun 2024, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya meningkat sebesar 0,42 poin.



### Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jakarta Barat, 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan komponen penyusun IPM Kota Jakarta Barat tahun 2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai 13,14 tahun menjadi komponen dengan percepatan tertinggi, yaitu sebesar 2,10 persen. Komponen HLS termasuk dalam dimensi pengetahuan. Selanjutnya, pengeluaran per kapita yang masuk ke dalam dimensi standar hidup layak tahun 2024 sebesar 22.119 ribu rupiah mengalami peningkatan 1,89 persen. Adapun Umur Harapan Hidup (UHH) yang mencapai 75,98 tahun meningkat sebesar 0,22 persen. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 yang mencapai 11,24 tahun menjadi komponen dengan percepatan terendah, yakni sebesar 0,09 persen.

Sumber data UHH menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Adapun, sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun, HLS, dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.

## SDGs Goal: Sustainable cities & human settlements

Goals

11

**Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable**

Sumber: [sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)

# Pertanian

# 10

## Statistik Tanaman Padi Kota Jakarta Barat, 2024

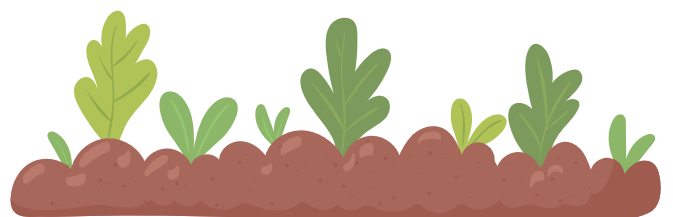


Sumber: Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi, 2024

Berdasarkan data luas panen, produksi, dan produktivitas yang dihasilkan dari kegiatan BPS Kerangka Sampel Area (KSA) di tahun 2024, luas panen padi di Kota Jakarta Barat adalah sebesar 27,3 hektar. Dari luas panen tersebut, didapatkan produksi padi sebanyak 140,8 ton dengan produktivitas sebesar 51,65 kuintal padi di setiap hektarnya.

Angka ini menunjukkan bahwa meskipun luas lahan pertanian di wilayah perkotaan seperti Jakarta Barat tergolong terbatas, namun kegiatan pertanian padi masih tetap berlangsung dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan lokal.

Secara umum, produktivitas yang mencapai lebih dari 50 kuintal per hektare menunjukkan tingkat efisiensi lahan yang cukup baik. Angka ini menandakan bahwa petani sudah cukup mampu memanfaatkan lahan sempit dengan teknik budidaya yang efektif. Selain itu, hal ini juga menggambarkan bahwa meski Jakarta Barat merupakan daerah urban dengan dominasi sektor non-pertanian, potensi sektor pertanian masih tetap ada dan berperan penting dalam mendukung ketersediaan pangan perkotaan.



### Komoditi Buah Unggulan di Setiap Kecamatan, 2024

Kecamatan	Jenis Buah	Kuintal
Kembangan	Mangga	375
Kebon Jeruk	Jambu Biji	42,4
Palmerah	-	-
Grogol Petamburan	Mangga	708
Tambora	-	-
Taman Sari	-	-
Cengkareng	Mangga	1918,1
Kali Deres	Belimbing	32

### Komoditi Buah Unggulan di Jakarta Barat, 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik - Statistik Pertanian Hortikultura SPH, 2024, diolah

Dari berbagai data komoditi buah yang dipanen di Kota Jakarta Barat, terlihat bahwa setiap kecamatan memiliki komoditas unggulannya. Komoditas unggulan yang paling menonjol di Kota Jakarta Barat adalah buah mangga. Buah mangga menjadi komoditas unggulan di Kecamatan Kembangan, Grogol Petamburan, dan Cengkareng, masing-masing 375, 708, dan 1.918 kuintal. Kecamatan Kebon Jeruk memiliki jambu air sebagai komoditas buah unggulan, yaitu sebesar 42,4 kuintal. Sementara, buah belimbing paling banyak ditemui di Kecamatan Kalideres (32 ku).

Secara keseluruhan, produksi buah unggulan di Jakarta Barat adalah buah mangga (3.032,1 ku), disusul oleh jambu air (1.989,32 ku). Angka ini menunjukkan bahwa meskipun wilayah Jakarta Barat tergolong urban, kegiatan hortikultura masih cukup berkembang di beberapa kecamatan dengan lahan yang memungkinkan. Keberadaan komoditas buah unggulan ini tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan perkotaan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber ekonomi masyarakat lokal.

## SDGs Goal: Sustainable Agriculture

Goals

2

**End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture**

Sumber: [sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)

# Keuangan & Koperasi

# 11

Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif di Jakarta Barat, 2021-2024



Sumber: Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Jakarta Barat

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bukan sekadar badan usaha biasa: ia juga diharapkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan nilai kekeluargaan. Kehadiran koperasi menjadi sangat penting terutama dalam rangka pemerataan kesejahteraan untuk semua kalangan secara menyeluruh. Koperasi bukan semata mencari keuntungan, melainkan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, perkembangan koperasi di Indonesia terus meningkat.

Di Kota Jakarta Barat, jumlah koperasi selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Melalui koperasi, masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses permodalan, pelatihan, atau pasar dapat memperoleh dukungan yang lebih kuat.

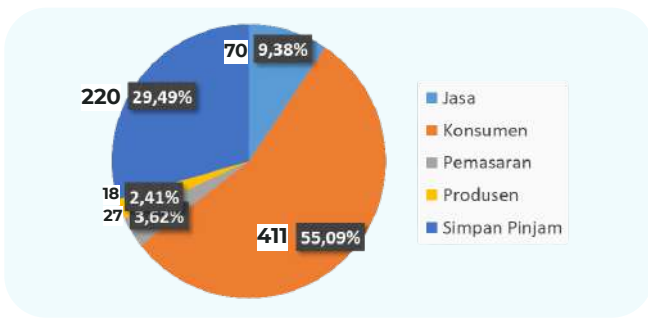
Statistik Koperasi Menurut Uraian di Jakarta Barat, 2024

Uraian		Nilai
Jumlah Anggota Koperasi	Orang	112.828
Modal Usaha	Rp	1.938.016.320.597
Volume Usaha	Rp	880.431.651.498
Sisa Hasil Usaha	Rp	62.784.760.690

Sumber: Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Jakarta Barat



### Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi di Jakarta Barat, 2024



Sumber: Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Jakarta Barat

Berdasarkan data Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Jakarta Barat tahun 2024, koperasi di Jakarta Barat didominasi oleh koperasi konsumen dengan jumlah 411 unit. Hal ini menunjukkan tingginya peran koperasi jenis ini dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi anggotanya. Selanjutnya, koperasi simpan pinjam (sebanyak 220 unit) yang berperan penting dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat. Sementara itu, koperasi jasa berjumlah 70 unit, koperasi pemasaran sebanyak 27 unit, dan koperasi produsen yang hanya 18 unit menggambarkan bahwa aktivitas koperasi di Jakarta Barat masih lebih terfokus pada bidang konsumsi dan keuangan.

Selain itu, data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa koperasi di Jakarta Barat memiliki 112.828 anggota, mencerminkan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam kegiatan ekonomi berbasis keber-samaan. Koperasi-koperasi ini ini mengelola modal usaha sebesar Rp1,93 triliun dan mencatat volume usaha mencapai Rp880,43 miliar, yang menandakan aktivitas ekonomi koperasi berjalan aktif di berbagai sektor. Selanjutnya, koperasi berhasil menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp62,78 miliar, menunjukkan kemampuan koperasi dalam menciptakan keuntungan yang dapat dibagikan kepada anggota serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Jakarta Barat.



Sumber: canva.com

## SDGs Goal: Financial Inclusion

Goals

17

**Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development**

Sumber: [sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)

# Energi & Air Bersih

# 12

## Statistik Ketenagalistrikan di Kota Jakarta Barat, 2024

Klasifikasi Pelanggan	Pelanggan	Kwh Siap Jual (000)	Kwh Terjual (000)	Persentase Kwh Terjual
Rumah Tangga	794.139	255.395	212.829	83,33
Usaha	58.278	166.278	138.565	83,33
Sosial	6.177	26.105	21.754	83,33
Pemerintah	1.771	6.688	6.178	92,37
Industri	1.948	47.119	39.266	83,33
Lainnya	1.574	4.139	4.032	97,43
<b>Total Kota Jakarta Barat</b>	<b>863.887</b>	<b>505.724</b>	<b>422.624</b>	<b>83,57</b>

Sumber: Jakarta Barat Dalam Angka 2025, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

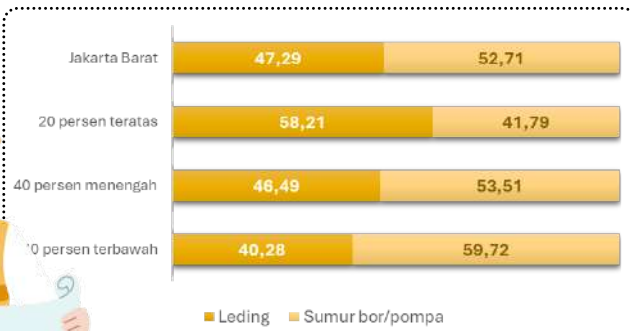


“Jumlah pelanggan PLN tahun 2024 di Kota Jakarta Barat mengalami peningkatan sebesar 26,20 persen.”

Listrik merupakan sumber energi utama yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Kota Jakarta Barat sebagai bagian dari kawasan metropolitan DKI Jakarta menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pelanggan PT PLN (Persero) pada tahun 2024. Jumlah pelanggan tercatat meningkat sebesar 26,20 persen, dari 684 ribu pelanggan pada tahun 2023 menjadi 863 ribu pelanggan pada tahun 2024.

PT PLN (Persero) menjamin pasokan listrik bagi masyarakat di tengah tingginya ketergantungan terhadap energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini tercermin dari nilai listrik siap jual yang lebih besar dibandingkan nilai listrik terjual, menandakan bahwa pasokan energi listrik di wilayah Kota Jakarta Barat masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Distribusi listrik di wilayah ini berada di bawah tanggung jawab Unit Induk Cengkareng dan Kebon Jeruk, yang berperan dalam menjaga keandalan pasokan listrik di tingkat pelanggan.

### Statistik Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll di Kota Jakarta Barat, 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi klasifikasi pelanggan, rumah tangga masih mendominasi dengan porsi sebesar 91,92 persen dari total pelanggan listrik di Kota Jakarta Barat pada tahun 2024. Badan usaha menempati urutan kedua dengan proporsi 6,75 persen, sedangkan pelanggan dari sektor sosial, pemerintah, industri, dan lainnya masing-masing memiliki proporsi di bawah satu persen.

Peningkatan jumlah pelanggan listrik sejalan dengan pertumbuhan pembangunan permukiman vertikal, kawasan niaga, serta tren elektrifikasi transportasi, termasuk pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), turut berkontribusi terhadap meningkatnya permintaan energi listrik di Jakarta Barat. Sebagai upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan, PLN terus melakukan modernisasi jaringan distribusi dan penguatan infrastruktur energi, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Selain listrik, air juga merupakan sumber daya penting yang dibutuhkan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Kota Jakarta Barat menggunakan air dari sumur bor sebagai sumber utama. Namun, semakin tinggi kelompok pengeluaran, semakin besar proporsi penggunaan air leding. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses terhadap layanan air bersih dari jaringan resmi lebih dominan pada kelompok masyarakat berpenghasilan lebih tinggi, sementara kelompok berpenghasilan lebih rendah masih bergantung pada sumber air non-leding seperti sumur bor atau air tanah.

## SDGs Goal: Water & Sanitation

Goals

6

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

Sumber: [sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)



# 13

# Perdagangan

## Profil Karakteristik Pasar di Kota Jakarta Barat, 2025



Sektor perdagangan masih menjadi sumber pertumbuhan utama dan mendominasi struktur perekonomian Kota Jakarta Barat. Pada tahun 2025, kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat lebih dari 19 persen, menegaskan bahwa sektor ini tetap menjadi primadona kegiatan ekonomi. Salah satu komponen penting dalam sektor ini adalah perdagangan besar dan eceran, yang sebagian besar aktivitasnya berlangsung di pasar tradisional dan pasar modern di wilayah Jakarta Barat.

Sebanyak tujuh belas pasar beroperasi pada siang hari dan dua pasar beroperasi selama 24 jam. Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pasar masih terkonsentrasi pada jam operasional reguler masyarakat, dengan sebagian kecil pasar berfungsi sebagai pusat distribusi harian.

Dari total pasar yang ada, tujuh belas pasar merupakan pasar eceran, satu pasar grosir, dan satu pasar khusus. Dominasi pasar eceran menegaskan karakter perdagangan di Jakarta Barat yang berorientasi konsumsi rumah tangga, bukan distribusi besar. Pasar di Jakarta Barat umumnya berperan pada skala lokal, terdiri dari 10 pasar lingkungan, 5 pasar wilayah, dan 5 pasar kota, tanpa pasar berskala regional. Hal ini menunjukkan fungsi pasar yang lebih dekat dengan kebutuhan harian masyarakat.

Sebagian besar pasar berada pada kategori berkembang (10 pasar), diikuti oleh 5 pasar tumbuh (B) dan 4 pasar maju (A). Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi penguatan pasar masih terbuka lebar melalui peningkatan fasilitas, kebersihan, dan manajemen operasional.



“  
Pada tahun 2025, jumlah pasar  
di Kota Jakarta Barat  
berjumlah 19 unit.”



Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PD Pasar Jaya telah melaksanakan program revitalisasi pasar tradisional yang berfokus pada peningkatan kenyamanan, kebersihan, dan efisiensi manajemen. Hingga tahun 2025, lebih dari 90 pasar di seluruh DKI Jakarta telah melalui proses revitalisasi atau modernisasi, termasuk beberapa di wilayah Jakarta Barat seperti Pasar Tomang Barat, Pasar Palmerah, dan Pasar Grogol.

Secara keseluruhan, pasar di Kota Jakarta Barat pada tahun 2025 memperlihatkan struktur perdagangan yang kuat di sektor eceran dengan potensi besar untuk tumbuh melalui modernisasi fasilitas dan digitalisasi sistem transaksi. Upaya sinergi antara PD Pasar Jaya, pelaku usaha mikro, serta masyarakat diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas pasar rakyat sebagai pusat ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

## SDGs Goal: Trade

Goals

17

**Strengthen the means of implementation and  
revitalize the Global Partnership for  
Sustainable Development**

Sumber: [sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)



# Hotel & Pariwisata

# 14



Kota Jakarta Barat telah dikenal sebagai salah satu kota di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki banyak lokasi wisata menarik dengan berbagai pengunjung nusantara hingga mancanegara, di antaranya Kawasan Kota Tua. Lokasi wisata ini menghadirkan berbagai variasi wisata dimulai dari wisata bersejarah, seni rupa, hingga kuliner.

Tempat wisata yang menjadi primadona di Kota Tua adalah museum. Berbagai museum menghadirkan tema sejarah yang berbeda-beda. Museum Fatahillah (Museum Sejarah Jakarta) menampilkan sejarah Jakarta dari masa prasejarah hingga kini, termasuk koleksi arkeologi, mebel antik, dan peninggalan kolonial Belanda. Kemudian, Museum Seni Rupa, Keramik dan Museum Wayang menyimpan berbagai karya seni rupa

Indonesia, seperti lukisan, patung, dan keramik tradisional maupun modern. Tak kalah primadonanya yaitu Museum Bank Indonesia dan Museum Bank Mandiri.

Selain museum di Kawasan Kota Tua, terdapat museum lainnya yang menyimpan sejarah di Kota Jakarta Barat, yaitu Museum Tekstil. Museum ini menjadi salah satu destinasi penting di Jakarta yang menyimpan dan melestarikan kekayaan tekstil tradisional Indonesia.

**Jumlah Pengunjung Museum di Jakarta Barat, 2023- 2024**

Museum	2023	2024
Sejarah Jakarta	615.877	399.826
Wayang	154.760	95.244
Seni Rupa dan Keramik	146.420	145.513
Tekstil	32.511	34.729
<b>Total</b>	<b>949.568</b>	<b>675.312</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Namun begitu, Data Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah pengunjung museum di Jakarta Barat menurun dari 949.568 orang pada tahun 2023 menjadi 675.312 orang pada tahun 2024. Penurunan terbesar terjadi di Museum Sejarah Jakarta, dari 615.877 menjadi 399.826 pengunjung saja, sementara Museum Wayang juga mengalami penurunan signifikan dari 154.760 menjadi 95.244 pengunjung. Sebaliknya, Museum Tekstil menunjukkan peningkatan dari 32.511 menjadi 34.729 pengunjung, walaupun tidak terlalu signifikan. Museum Seni Rupa dan Keramik relatif stabil dengan sedikit penurunan. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun minat masyarakat terhadap museum masih cukup tinggi, diperlukan inovasi program dan promosi lebih aktif agar jumlah kunjungan ke museum-museum di Jakarta Barat dapat kembali meningkat.



### Jumlah Gedung/Sarana Wisata di Jakarta Barat, 2024



Sumber: Sudis Pariwisata dan Kebudayaan Jakbar

Sehubungan dengan banyaknya lokasi wisata yang ada di Kota Jakarta Barat, berbagai sarana lainnya juga cukup berkembang dan memberikan kontribusi bagi peningkatan sektor pariwisata. Hotel bintang dan nonbintang, rumah makan, bioskop, griya pijat, dan karaoke melengkapi perjalanan para wisatawan dalam menempuh jelajah baru. Pengembangan wisata budaya dan edukatif di Kota Jakarta Barat masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan guna menyeimbangkan variasi desti-nasi wisata di Jakarta Barat.

## SDGs Goal: Sustainable Tourism

Goals

8

**Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all**

Sumber: [sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)

# Transportasi & Komunikasi

# 15

## Jumlah Transportasi Umum di Kota Jakarta Barat, 2024

Jenis Transportasi	Jumlah
Bus Antarkota Provinsi (AKAP)	567
Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB)	47
Bus Transjakarta (BRT)	232
Bus Transjakarta (Non BRT)	74
Mikrotrans (Jaklingko)	484
Angkutan Kota (Reguler)	390
Bajaj (Angling)	219
Bus Sekolah	60



Sumber: Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Barat

## Persentase Penduduk 5 tahun ke atas terkait Penggunaan TI dalam 3 Bulan Terakhir, 2024

Kelompok Pengeluaran	Telepon Seluler	Internet
40 persen terbawah	86,02	82,55
40 persen tengah	92,99	89,29
20 persen teratas	94,18	91,49
Pendidikan tertinggi KRT	Telepon Seluler	Internet
SD ke bawah	76,67	68,03
SMP ke atas	96,90	95,91
<b>Jakarta Barat</b>	<b>90,53</b>	<b>87,13</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik - SUSENAS Maret 2024

Kemajuan transportasi umum memang dapat dijadikan salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Hal ini karena transportasi publik yang maju mencerminkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas hidup masyarakat. Wilayah dengan sistem transportasi umum yang baik (seperti tersedianya moda transportasi yang terjangkau, aman, tepat waktu, dan terintegrasi) menunjukkan bahwa pemerintah berhasil memenuhi kebutuhan mobilitas warganya secara merata.

Berdasarkan data pada tahun 2024 dari Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Barat, persebaran transportasi umum di Kota Jakarta Barat telah merata sesuai dengan program yang dijalankan Provinsi DKI Jakarta. Mobilitas penduduk Jakarta Barat juga tidak hanya terbatas pada dalam kota, namun juga antarkota sebanyak 567 bus. Selain itu juga banyak sekali transportasi umum yang melayani masyarakat secara meluruh dan terjangkau (baik dari segi biaya maupun akses)

di antaranya adalah Bus Transjakarta sebanyak 306 unit, Mikrotrans 484 unit, dan Angkutan Kota Reguler 390 unit. Masyarakat juga diberikan pilihan untuk menikmati perjalanan menggunakan bajaj yang tersebar di Kota Jakarta Barat sebanyak 219 unit. Anak-anak yang sedang bersekolah juga difasilitasi bus sekolah rute sejumlah 60 unit.

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi juga mendukung pemerataan aksesibilitas dan kemajuan suatu wilayah. Telepon seluler dan internet tentunya diharapkan sudah tersebar di seluruh wilayah. Secara keseluruhan, lebih dari 87 persen penduduk Kota Jakarta Barat yang berusia 5 tahun ke atas telah menggunakan internet dan lebih dari 90 persen menggunakan telepon seluler.



BPS mencatat melalui SUSENAS tahun 2024, bahwa terdapat perbedaan pola penggunaan telepon seluler dan internet pada karakteristik kelompok pengeluaran dan pendidikan kepala rumah tangga. Sebagaimana tabel di atas, penggunaan teknologi informasi cenderung meningkat seiring dengan tingkat pengeluaran rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi masih berpengaruh terhadap akses teknologi, terutama dalam kemampuan membeli perangkat dan membayar layanan internet.

Dari sisi pendidikan, terdapat kesenjangan digital yang cukup jelas antara rumah tangga dengan KRT berpendidikan rendah dan tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga peningkatan kualitas pendidikan dapat menjadi kunci untuk mempersempit kesenjangan digital di Jakarta Barat.

## SDGs Goal: Sustainable Transport

Goals

11

**Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable**

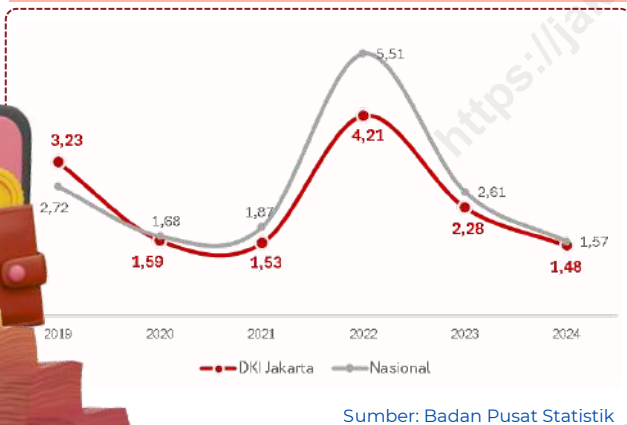
Sumber: [sdgs.un.org/goals](https://sdgs.un.org/goals)



# Harga

# 16

Laju Inflasi  
Provinsi DKI Jakarta dan Nasional, 2019-2024



Laju Inflasi DKI Jakarta lebih rendah daripada laju Inflasi Nasional.

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang mencerminkan pergerakan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu. Kenaikan inflasi mengindikasikan meningkatnya harga kebutuhan masyarakat, yang berimplikasi pada menurunnya daya beli dan nilai riil mata uang.

Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta, laju inflasi Jakarta dan nasional menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir (2019–2024). Setelah mencapai puncak pada tahun 2022 akibat tekanan harga pangan global dan penyesuaian harga energi pascapandemi, inflasi berangsur turun hingga tahun 2024.

Pada tahun 2024, inflasi Jakarta tercatat sebesar 1,48 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 1,57 persen. Perbedaan paling mencolok terjadi pada tahun 2022, di mana inflasi nasional mencapai 6,51 persen, sedangkan DKI Jakarta relatif lebih terkendali di angka 4,21 persen. Kondisi ini menunjukkan kemampuan Jakarta dalam menjaga stabilitas harga melalui pasokan barang yang relatif terjaga dan distribusi yang lebih efisien.

Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, tahun 2024 menunjukkan bahwa komponen perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi di Jakarta, yaitu 8,10 persen, jauh di atas rata-rata inflasi umum. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya permintaan produk kecantikan, perawatan tubuh, serta jasa salon dan kebugaran pascapandemi—terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta yang memiliki gaya hidup konsumtif.

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/res-toran menempati posisi kedua dengan inflasi sebesar 2,80 persen. Fenomena ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat di luar rumah, pertumbuhan sektor kuliner, serta naiknya harga bahan pangan tertentu seperti beras dan cabai merah di paruh kedua tahun 2024.

Sementara itu, beberapa kelompok pengeluaran justru mengalami deflasi, seperti transportasi (-1,15 persen) dan informasi, komunikasi, serta jasa keuangan (-0,04 persen). Deflasi transportasi terutama disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara setelah periode libur panjang, serta efisiensi layanan transportasi daring.

Beberapa faktor yang turut memengaruhi laju inflasi rendah di Jakarta antara lain: (1) Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang secara rutin digelar Pemprov DKI bersama Bulog dan Bank Indonesia untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok. (2) Optimalisasi distribusi barang melalui penguatan rantai pasok dari pasar induk dan pelabuhan ke wilayah administrasi, yang membantu menekan lonjakan harga komoditas. (3) Meningkatnya adopsi digitalisasi ekonomi, seperti penggunaan e-commerce dan layanan pengantaran bahan pangan yang memperluas akses konsumen terhadap harga yang lebih kompetitif.

Dengan kondisi ini, DKI Jakarta berhasil menjaga inflasi tetap terkendali di bawah angka nasional. Stabilitas harga ini menjadi sinyal positif bagi daya beli masyarakat serta daya saing ekonomi daerah.

Laju Inflasi Nasional (%)		Laju Inflasi DKI Jakarta (%)
7,02	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8,10
2,48	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,8
1,94	Pendidikan	2,39
1,04	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,14
1,90	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,67
1,93	Kesehatan	1,63
1,16	Pakaian dan Alas Kaki	0,93
0,59	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,62
0,38	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,17
-0,27	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,04
-0,30	Transportasi	-1,15

Sumber: Badan Pusat Statistik - SUSENAS Maret 2024

#### Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta dan Nasional menurut Kelompok Pengeluaran, 2024

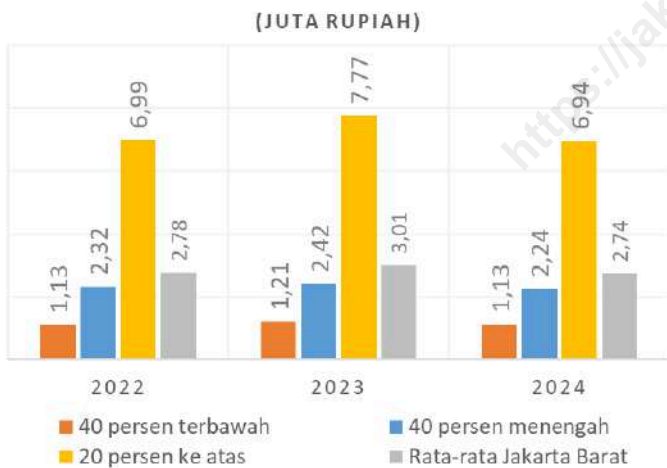
Perawatan pribadi dan jasa lainnya menduduki inflasi tertinggi pada jenis kelompok pengeluaran tahun 2024 sebesar 8,10 persen.



# Pengeluaran Penduduk

# 17

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Penduduk Jakarta Barat Menurut Kelompok Pengeluaran



Sumber: Badan Pusat Statistik - SUSENAS Maret 2024

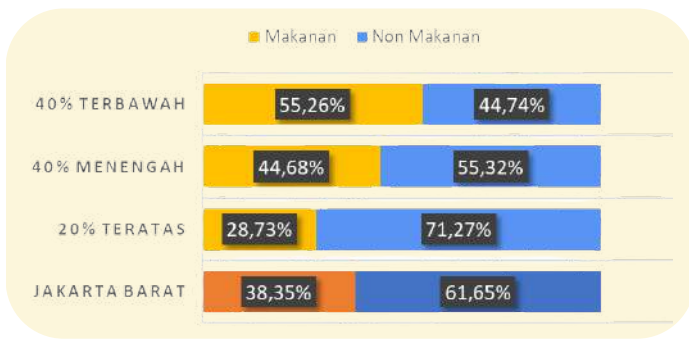
Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Jakarta Barat menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup lebar antar kelompok pengeluaran. Pada tahun 2022, kelompok 20 persen penduduk dengan pengeluaran tertinggi mencatat rata-rata Rp6,99 juta per kapita per bulan, jauh di atas kelompok 40 persen menengah yang sebesar Rp2,32 juta dan

40 persen terbawah sebesar Rp1,13 juta. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar pengeluaran masih didominasi oleh kelompok atas.

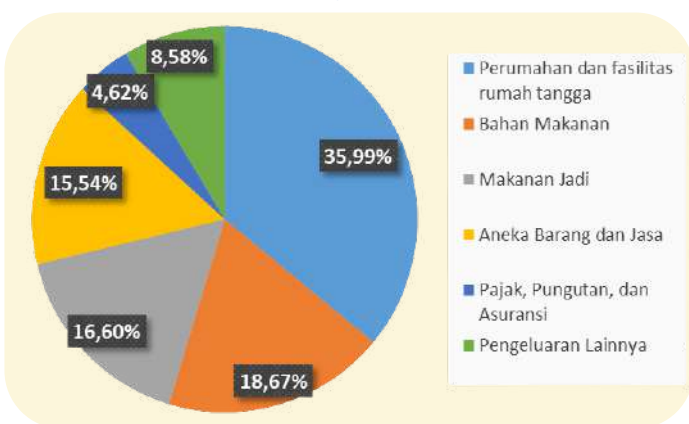
Pada tahun 2023, seluruh kelompok mengalami peningkatan pengeluaran, dengan lonjakan paling besar terjadi pada kelompok 20 persen ke atas yang mencapai Rp7,77 juta. Secara rata-rata, pengeluaran perkapita penduduk Kota Jakarta Barat meningkat menjadi Rp3,01 juta.

Namun, pada tahun 2024, meskipun rata-rata pengeluaran tetap relatif tinggi, terlihat sedikit penurunan pada setiap kelompok pengeluaran, bahkan kelompok atas menjadi Rp6,94 juta yang lebih rendah dari tahun 2022. Walaupun masih stagnan, kelompok terbawah juga turun dan kembali ke angka Rp1,13 juta. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang memengaruhi daya beli, terutama di kalangan menengah dan atas, meskipun kesenjangan antar kelompok masih tetap lebar.

### Distribusi Konsumsi Makanan dan Non Makanan Menurut Rincian Pengeluaran, 2024



### Struktur Pengeluaran Perkapita Menurut Rincian Pengeluaran, 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik - SUSENAS Maret 2024

Struktur pengeluaran penduduk meng-gambarkan rincian pengeluaran mana yang menjadi biaya hidup terbesar bagi penduduk Kota Jakarta Barat. Berdasarkan data Susenas Maret 2024, sebagian besar pengeluaran rumah tangga masih didominasi oleh kebutuhan dasar. Pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga menjadi biaya terbesar yang harus dikeluarkan penduduk setiap bulannya, mencapai hampir 36 persen dari total pengeluaran. Biaya ini mencakup biaya sewa, listrik, air, dan pemeliharaan rumah. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan tempat tinggal menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, terutama di wilayah dengan biaya hidup tinggi seperti Jakarta Barat.

Sementara itu, pengeluaran untuk konsumsi makan (bahan makanan dan makanan jadi) menghabiskan kurang lebih 35 persen dari total pengeluaran. Jika dilihat lebih rinci, pengeluaran untuk makanan jadi hampir

### John Maynard Keynes

**"The consumption of goods and services is the ultimate purpose of all economic activity."**  
 → Konsumsi barang dan jasa adalah tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi.



**"When people cannot consume, economies cannot grow."**  
 → Ketika masyarakat tidak mampu berbelanja, perekonomian tidak dapat tumbuh.

### Simon Kuznets

**"Economic growth and rising income lead to greater capacity for consumption and improvement in living standards."**  
 → Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan membawa kemampuan konsumsi yang lebih besar serta peningkatan taraf hidup.

menyamai distribusi pengeluaran bahan makanan. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk Kota Jakarta Barat banyak mengalokasikan keperluan makan dari aktivitas luar seperti membeli makanan dari restoran, kantin, kedai makanan, rumah makan, dan lain-lain.

Kategori lain seperti aneka barang dan jasa (15,54 persen), pajak dan asuransi (4,62 persen), serta pengeluaran lainnya (8,58 persen) menunjukkan diversifikasi kebutuhan rumah tangga yang mulai meluas ke sektor non-esensial. Meningkatnya proporsi pengeluaran di sektor jasa dan asuransi mencerminkan adanya peningkatan kesadaran terhadap perlindungan finansial dan gaya hidup modern. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan dasar masih mendominasi, masyarakat Jakarta Barat mulai memperlihatkan pergeseran menuju konsumsi yang lebih beragam dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup.

Secara keseluruhan, distribusi konsumsi makanan dan non makanan di setiap kelompok pengeluaran memiliki pola yang berbeda-beda. Pada kelompok pengeluaran terbawah, biaya hidup masih dominan dialokasikan untuk konsumsi makanan (55,26 persen). Sebaliknya, kelompok pengeluaran teratas hanya mengalokasikan 28,73% untuk makanan dan lebih dari 70% untuk non-makanan. Hal ini mencerminkan bahwa dengan taraf kemampuan ekonomi yang lebih baik, masyarakat mampu membelanjakan uang pada kebutuhan sekunder seperti pendidikan, transportasi, dan rekreasi.

# Pendapatan Regional

# 18

## Perkembangan PDRB Kota Jakarta Barat, 2023-2024

Indikator	Satuan	2023	2024
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Milyar Rp	<b>363.931,23</b>	<b>383.113,08</b>
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Milyar Rp	<b>585.463,90</b>	<b>627.869,62</b>
Pertumbuhan Ekonomi	%	<b>5,30</b>	<b>5,27</b>
Indeks Implisit PDRB Tahun Dasar		<b>160,87</b>	<b>163,89</b>
Laju Implisit PDRB Tahun Dasar	%	<b>2,82</b>	<b>1,87</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama untuk menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan data BPS, PDRB Kota Jakarta Barat pada tahun 2024 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) me-ningkat dari Rp585,46 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp627,87 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 7,25 persen secara nominal. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) — yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi — naik dari Rp363,93 triliun menjadi Rp383,11 triliun.



Pertumbuhan ekonomi Kota Jakarta Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,27 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 5,30 persen. Perlambatan ini sejalan dengan tren ekonomi DKI Jakarta dan nasional yang mulai stabil setelah periode pemulihan pasca-pandemi.

Meskipun demikian, laju pertumbuhan tersebut masih menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat, terutama pada sektor-sektor utama seperti:

Perdagangan besar dan eceran, yang tetap menjadi tulang punggung ekonomi wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB.

Industri pengolahan dan konstruksi, yang tumbuh seiring peningkatan investasi infrastruktur dan kegiatan manufaktur perkotaan.

Informasi dan komunikasi, yang terus meningkat sejalan dengan digitalisasi bisnis dan layanan publik di wilayah Jakarta Barat.

Indeks implisit PDRB — yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang diproduksi — mengalami peningkatan dari 160,87 pada tahun 2023 menjadi 163,89 pada tahun 2024. Namun, laju implisit PDRB menurun dari 2,82 persen menjadi 1,87 persen, menunjukkan tekanan inflasi yang mulai mereda sepanjang tahun 2024.

Kondisi ini konsisten dengan tren inflasi Provinsi DKI Jakarta yang menurun hingga 1,48 persen pada tahun yang sama. Penurunan laju harga tersebut memberikan ruang bagi kestabilan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat Jakarta Barat.

Rendahnya tekanan inflasi dan meningkatnya efisiensi distribusi barang turut mendukung stabilitas ekonomi wilayah. Ke depan, penguatan sektor industri pengolahan, digitalisasi perdagangan, serta pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta Barat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

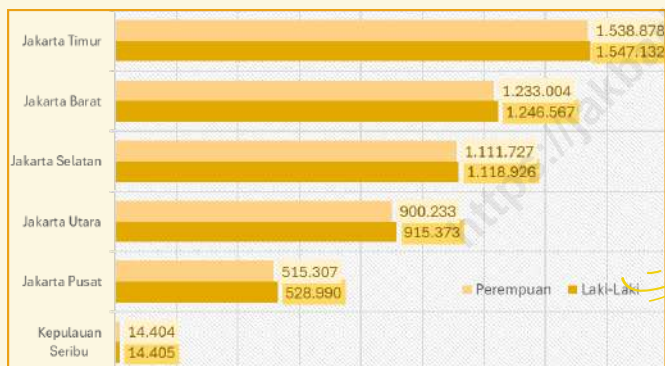
Selama periode Triwulan II-2023 hingga Triwulan II-2025, laju pertumbuhan ekonomi Kota Jakarta Barat menunjukkan fluktuasi antar sektor. Sektor sekunder mencatat pertumbuhan tertinggi pada Triwulan IV-2024 sebesar 4,29 persen, namun mengalami kontraksi terdalam pada Triwulan I-2025 sebesar -4,71 persen. Sektor primer cenderung berfluktuasi, dengan perbaikan pada Triwulan II-2025 yang tumbuh 1,50 persen. Sementara itu, sektor tersier tumbuh stabil di kisaran 0,3–2,8 persen dan menjadi penopang utama perekonomian.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jakarta Barat mengalami pertumbuhan tertinggi pada Triwulan IV-2024 (2,75 persen) dan sempat berkontraksi pada Triwulan I-2025 (-0,33 persen) sebelum kembali tumbuh pada Triwulan II-2025 sebesar 0,69 persen. Secara keseluruhan, perekonomian Kota Jakarta Barat tahun 2024 tumbuh stabil dan terkendali, dengan peningkatan nilai PDRB baik secara nominal maupun riil. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Jakarta Barat mengalami sedikit perlambatan, namun struktur ekonomi tetap kuat khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang tercakup dalam sektor tersier.



# Perbandingan Regional 19

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2024



Sumber:  
 Data 2020 menggunakan SP 2020, BPS  
 Data 2021-2023 menggunakan Proyeksi Penduduk hasil SP2020, BPS

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2024, Kota Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebanyak 3,086 juta jiwa (terdiri atas 1,538 juta penduduk perempuan dan 1,547 juta penduduk laki-laki).

Posisi kedua ditempati oleh Kota Jakarta Barat dengan jumlah penduduk sekitar 2,480 juta jiwa, disusul oleh Kota Jakarta Selatan sebanyak 2,230 juta jiwa. Sementara itu, Kota Jakarta Pusat memiliki jumlah penduduk paling sedikit di antara wilayah daratan, yakni sekitar 1,04 juta jiwa, dan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling kecil, yaitu sekitar 28,8 ribu jiwa.



*Kota Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.*

Secara umum, sebaran penduduk DKI Jakarta masih menunjukkan konsentrasi tinggi di wilayah timur dan barat, yang merupakan kawasan dengan aktivitas permukiman dan ekonomi yang padat.

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tercatat sebesar 0,12 persen, melanjutkan tren penurunan sejak tahun 2020. Penurunan ini menunjukkan perlambatan pertumbuhan jumlah penduduk di sebagian besar wilayah ibu kota.

Berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, mencapai 1,00 persen pada tahun 2024. Sementara itu, Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Timur mencatatkan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -0,22 persen dan -0,48 persen, yang menandakan adanya penurunan jumlah penduduk di kedua wilayah tersebut.

Adapun Kota Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat masih menunjukkan pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 0,39 persen, 0,21 persen, dan 0,12 persen. Meskipun demikian, seluruh wilayah di DKI Jakarta secara umum memperlihatkan perlambatan laju pertumbuhan penduduk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

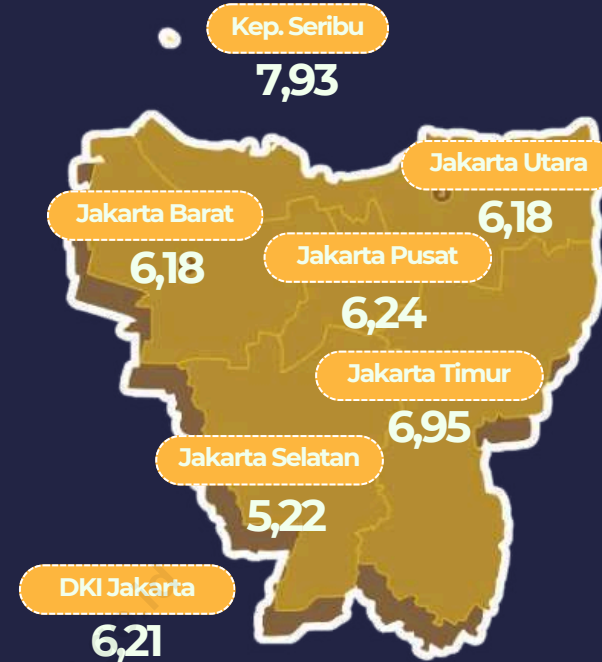
Perkembangan ini sejalan dengan pola urbanisasi dan mobilitas penduduk yang semakin terkonsentrasi di wilayah penyangga Jakarta, serta meningkatnya tingkat hunian vertikal dan efisiensi ruang di wilayah perkotaan.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 6,21 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja di DKI Jakarta, sekitar enam orang di antaranya belum memiliki pekerjaan namun aktif mencari kerja.

Kabupaten Kep. Seribu mencatat TPT tertinggi, yaitu sebesar 7,93 persen. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya kesempatan kerja di wilayah kepulauan yang bergantung pada sektor pariwisata dan jasa.

Sementara itu, Kota Jakarta Selatan memiliki tingkat pengangguran terendah di antara wilayah lainnya, yakni 5,22 persen. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah Jakarta Selatan yang didominasi oleh sektor jasa profesional dan perdagangan, yang relatif lebih mampu menyerap tenaga kerja.

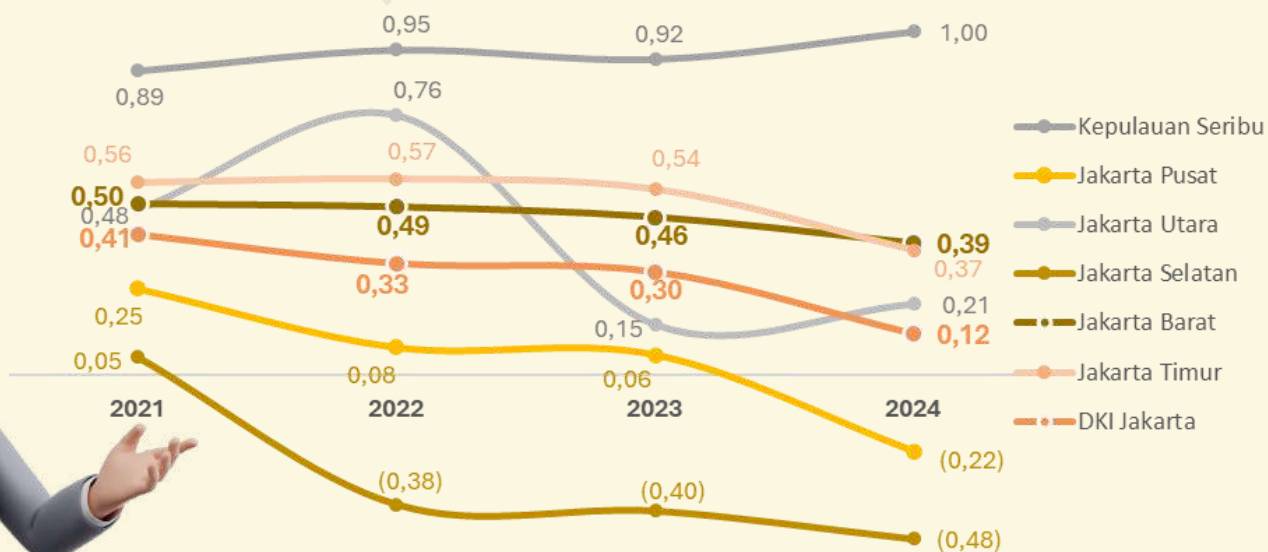
### Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2024



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus, BPS

Kota Jakarta Barat dan Utara memiliki Tingkat Pengangguran terkecil di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

### Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2024



Sumber: Data 2020 menggunakan SP 2020, BPS  
Data 2021-2023 menggunakan Proyeksi Penduduk hasil SP2020, BPS



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA JAKARTA BARAT